



LKJiP



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Mataram, Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd

NIP. 19710124 199801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... III

DAFTAR TABEL..... V

DAFTAR GAMBAR VII

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 7

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) 10

1.4. STRUKTUR ORGANISASI..... 23

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 25

1.5.1. Kepala Dinas 25

1.5.2. Fungsional Perencana..... 25

1.5.3. Sekretaris 26

1.5.4. Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas 30

1.5.5. Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan 33

1.5.6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Khusus 36

1.5.7. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan 39

1.5.8. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan 42

1.5.9. Balai Teknologi, Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP) 44

1.5.10. Museum..... 47

1.5.11. Kantor Cabang Dinas 47

BAB II PERENCANAAN KINERJA 49

2.1. RENCANA STRATEGIS 49

2.1.1. Tujuan dan Sasaran 49

2.1.2. Indikator Kinerja Utama 52

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 55

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 57

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020..... 57

3.2.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021.....	59
3.2.1.	Capaian Indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2021 Bidang Pendidikan...	59
3.2.2.	Capaian Indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2021 Bidang Kebudayaan.	59
3.3.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2021	60
3.4.	CAPAIAN SASARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NTB TAHUN 2021	61
3.5.	CAPAIAN KINERJA DIKBUD NTB BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2021	62
3.6.	CAPAIAN KINERJA DIKBUD NTB TAHUN 2021 BIDANG KEBUDAYAAN	74
3.7.	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA DAN SOLUSI.....	76
3.8.	ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA	83
3.9.	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA.....	83
3.10.	REALISASI ANGGARAN	84
3.10.1.	Realisasi Anggaran Sekretariat	85
3.10.2.	Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) ..	87
3.10.3.	Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan Pendidikan SMK.....	89
3.10.4.	Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan PK-PLK	92
3.10.5.	Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan	93
3.10.6.	Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kebudayaan.....	95
3.11.	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	97
BAB IV PENUTUP		98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan RPJMD Pemerintah Provinsi NTB	8
Tabel 1.3.1.	Matrik Permasalahan Berdasarkan Pemetaan Indikator Kinerja	12
Tabel 2.1.1.1.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran	49
Tabel 2.1.2.	Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Dalam Pencapaian Kinerja Periode 2019 sd. 2023	50
Tabel 2.1.2.1.	Indikator Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	53
Tabel 2.1.2.2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2019-2023	53
Tabel 3.3.1.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021	61
Tabel 3.4.1.	Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Dikbud NTB Tahun 2021	61
Tabel 3.5.1.	Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2021	62
Tabel 3.5.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021	63
Tabel 3.6.1.	Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2021 (Setelah Revisi RPJMD dan Renstra)	74
Tabel 3.7.1.	Permasalahan Dalam Pencapaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2021	77
Tabel 3.10.1.1.	Realisasi Anggaran Sekretariat DIKBUD NTB Tahun Anggaran 2020	85
Tabel 3.10.2.	Realisasi Fisik Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020	86
Tabel 3.10.2.1.	Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan SMA Tahun Anggaran 2020	87
Tabel 3.10.3.	Realisasi Fisik Bidang Pembinaan SMA Tahun 2020	88
Tabel 3.10.4.	Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan SMK Tahun Anggaran 2020	90
Tabel 3.10.5.	Realisasi Fisik Bidang Pengelolaan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2020	90
Tabel 3.10.5.	Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan PKPLK Tahun Anggaran 2020	92
Tabel 3.10.6.	Realisasi Fisik Bidang Pengelolaan PKPLK Tahun Anggaran 2020	92
Tabel 3.10.6.	Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan Tahun Anggaran 2020	94
Tabel 3.10.7.	Realisasi Fisik Bidang Pembinaan Ketenagaan Tahun Anggaran 2020	94
Tabel 3.10.7.	Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 ...	96
Tabel 3.10.8.	Realisasi Fisik Bidang Pembinaan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020	96
Tabel 3.10.8.	Jumlah dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2023	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1.	Jumlah Penduduk NTB dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah Menengah Usia 16 sd. 18 Tahun 2021	2
Gambar 1.1.2.	Grafik Jumlah SMA Negeri dan Suasta di Kabupaten Kota se Provinsi NTB ..	3
Gambar 1.1.3.	Grafik Jumlah SMK Negeri dan Suasta di Kabupaten Kota se Provinsi NTB ..	3
Gambar 1.1.4.	Grafik Rasio Murid dan Guru SMA, dan SMK di Provinsi NTB Tahun 2021 ...	4
Gambar 1.1.5.	Grafik Kondisi dan Jumlah Ruang Kelas Jenjang SMA Tahun 2020 / 2021	4
Gambar 1.1.6.	Grafik Kondisi dan Jumlah Ruang Kelas Jenjang SMK Tahun 2020 / 2021	5
Gambar 1.4.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	24
Gambar 3.1.1.	Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) NTB Tahun 2020	57
Gambar 3.1.2.	Grafik Capaian Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan	58
Gambar 3.4.1.	Grafik Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 sd. 2021	61
Gambar 3.4.2.	Grafik Pergerakan Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 sd. 2021	62
Gambar 3.10.1.	Grafik Distribusi Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2020 ..	84
Gambar 3.10.7.1.	Grafik Realisasi Anggaran Dikbud NTB Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2023	97

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam *dokumen perjanjian kinerja* dan *dokumen perencanaan*. Selain itu, Dokumen LkjIP terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan

Dalam rangka menjamin terwujudnya sebuah accountability atau akuntabilitas, dalam sebuah organisasi diperlukan pemberdayaan semua komponen yang bekerja dalam sebuah system. Sedangkan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja, diperlukan sebuah laporan kinerja. Dalam hal ini, selain sebagai kewajiban, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat bermaksud untuk menyajikan sebuah laporan kinerja yang menggambarkan kinerja utuh, yang telah tersusun secara systemic dalam organisasi, terukur, dan tergambar secara nyata tingkat tanggungjawab setiap pemangku kegiatan di lingkungan Dikbud Provinsi NTB. Dengan demikian dapat disebut accountable.

Sebagai gambaran tentang Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut ini dipaparkan tentang organisasi Dikbud NTB, potensi dan kekuatan atau aspek – aspek strategis dalam organisasi dalam menghadapi atau menangani berbagai permasalahan pendidikan di NTB. Personel yang bekerja dalam struktur organisasi berikut dengan tugas dan fungsi mereka dalam mengelola pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

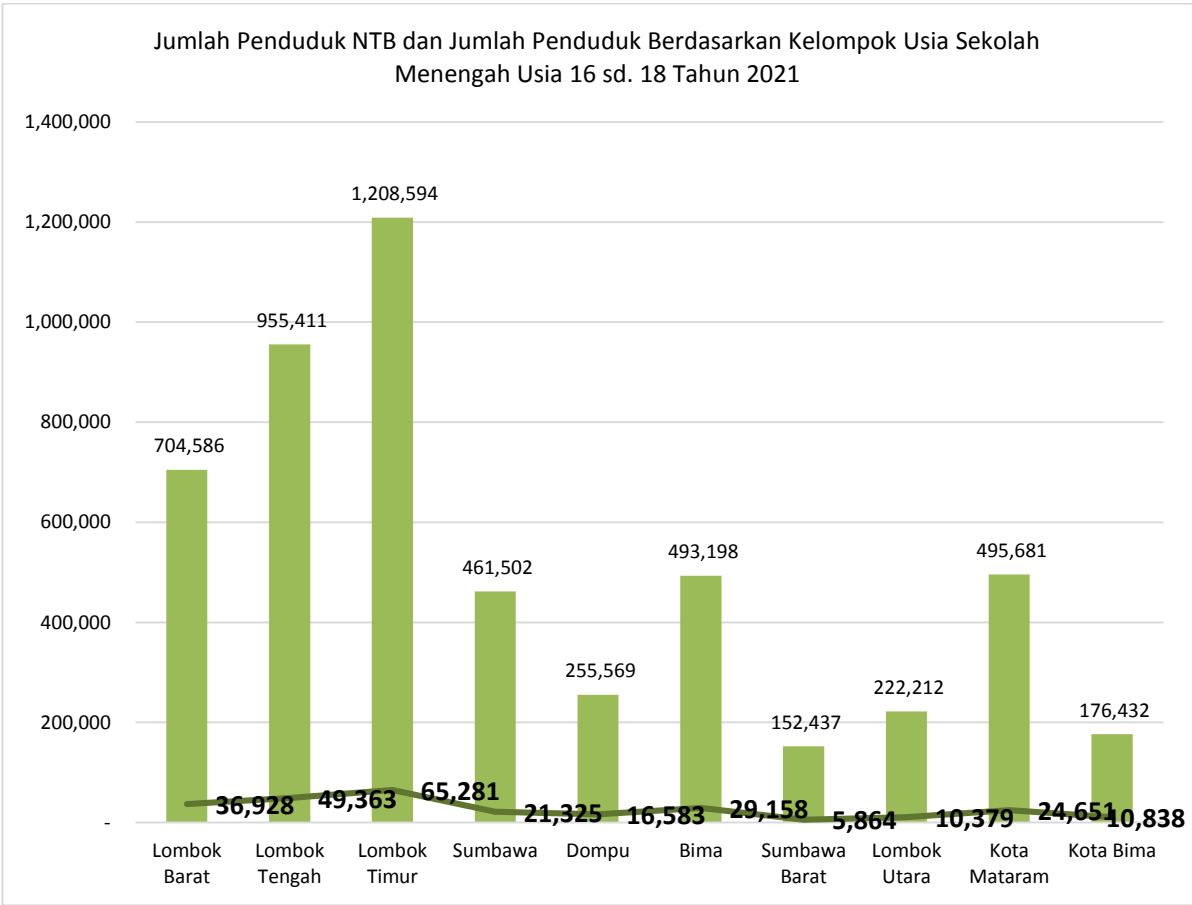
1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam mengemban tujuan dan amanah konstitusi yaitu untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, layanan pendidikan

dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan skala nasional. Sebagai lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB membantu Gubernur Provinsi NTB dalam melaksanakan Tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2019, yaitu Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam Visi dan Misi Gubernur Provinsi NTB yaitu ingin mewujudkan “*NTB Gemilang*”. Khusus untuk pendidikan tertuang dalam misi ke 3 (tiga) yaitu “*NTB Sehat dan Cerdas*” selanjutnya, Dikbud NTB menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah dengan rumusan tujuan *Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan, Strategi meliputi Peningkatan Pemerataan Pendidikan; Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan; dan Peningkatan kualitas data.*

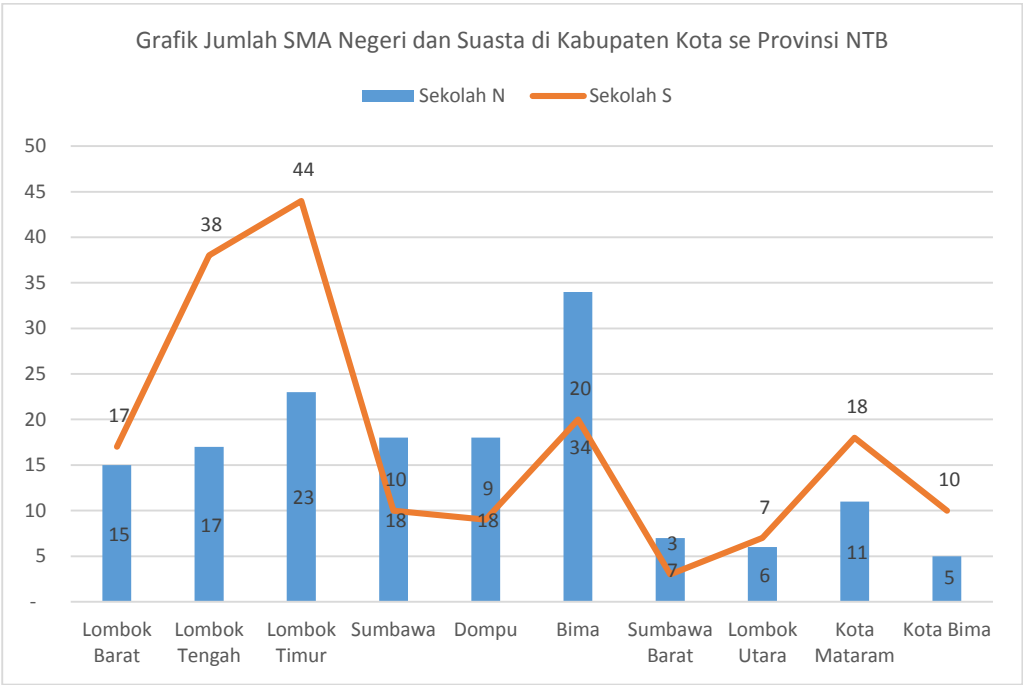
Penerapan visi dan misi tersebut mencakup seluruh penduduk NTB yang mencapai 5,125,622 jiwa pada tahun 2021 dan khusus penduduk kelompok usia sekolah menengah mencapai 270,370.



Sumber BPS Provinsi NTB

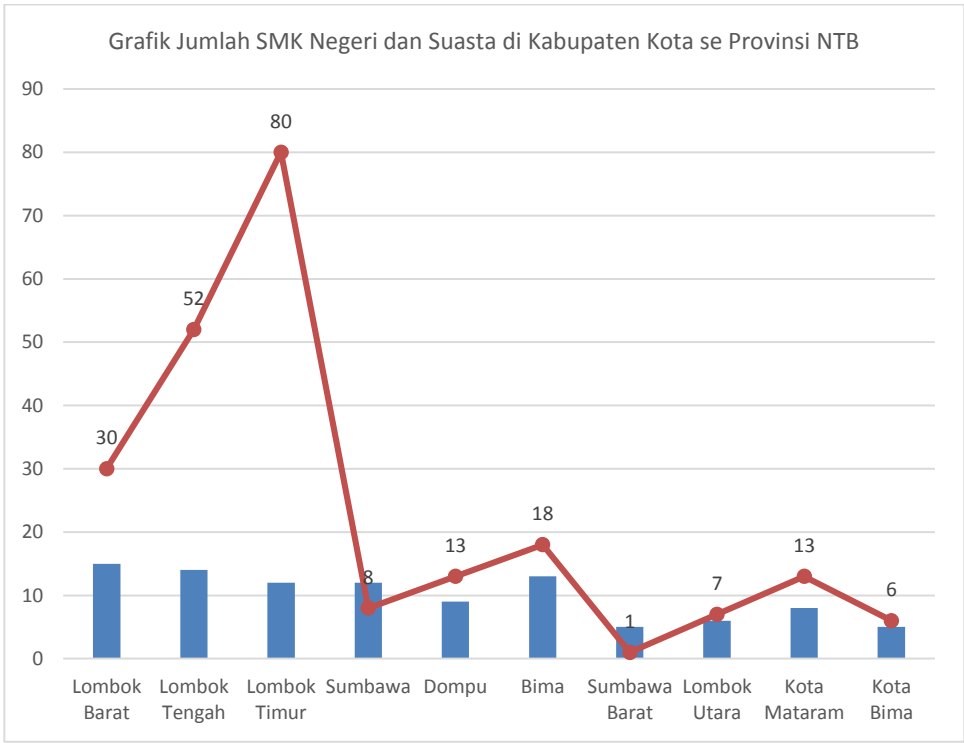
Gambar 1.1.1. Jumlah Penduduk NTB dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah Menengah Usia 16 sd. 18 Tahun 2021

Jumlah Sekolah Menengah mencapai 154 SMA Negeri, 176 SMA Suasta, 99 SMK Negeri, 228 SMK Suasta, 16 SLB Negeri, dan 29 SLB Suasta sehingga total jumlah Sekolah mencapai 702 Sekolah.



Sumber : DAPODIK

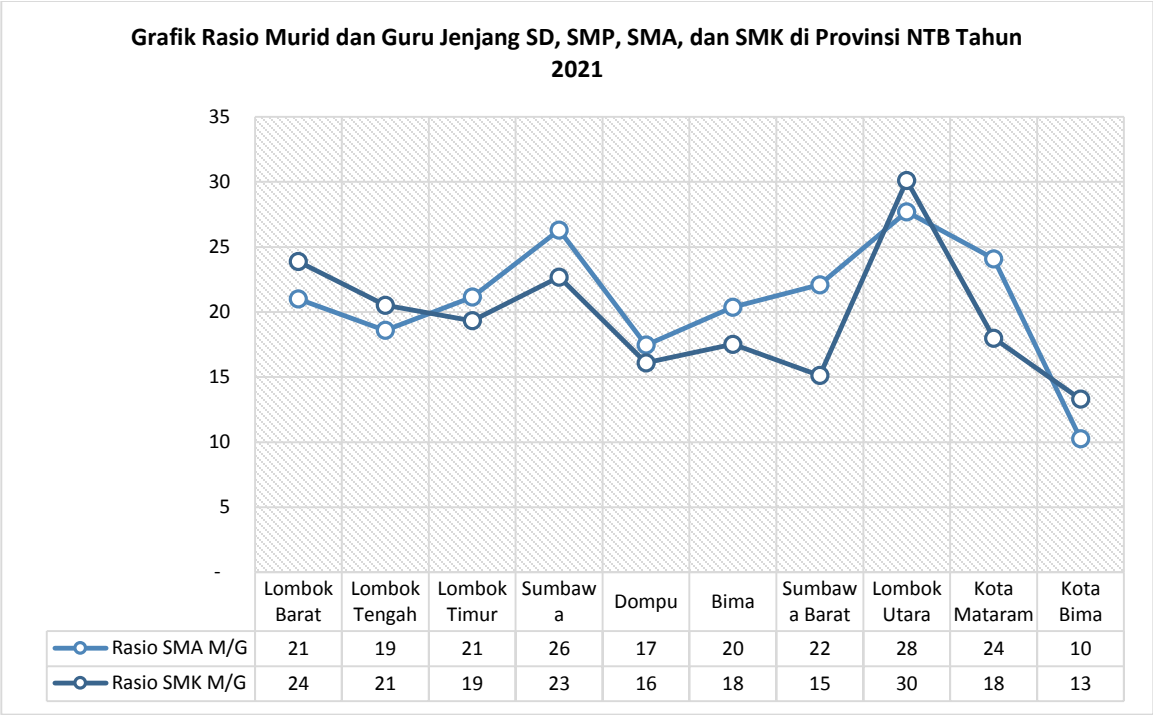
Gambar 1.1.2. Grafik Jumlah SMA Negeri dan Suasta di Kabupaten Kota se Provinsi NTB



Sumber : DAPODIK

Gambar 1.1.3. Grafik Jumlah SMK Negeri dan Suasta di Kabupaten Kota se Provinsi NTB

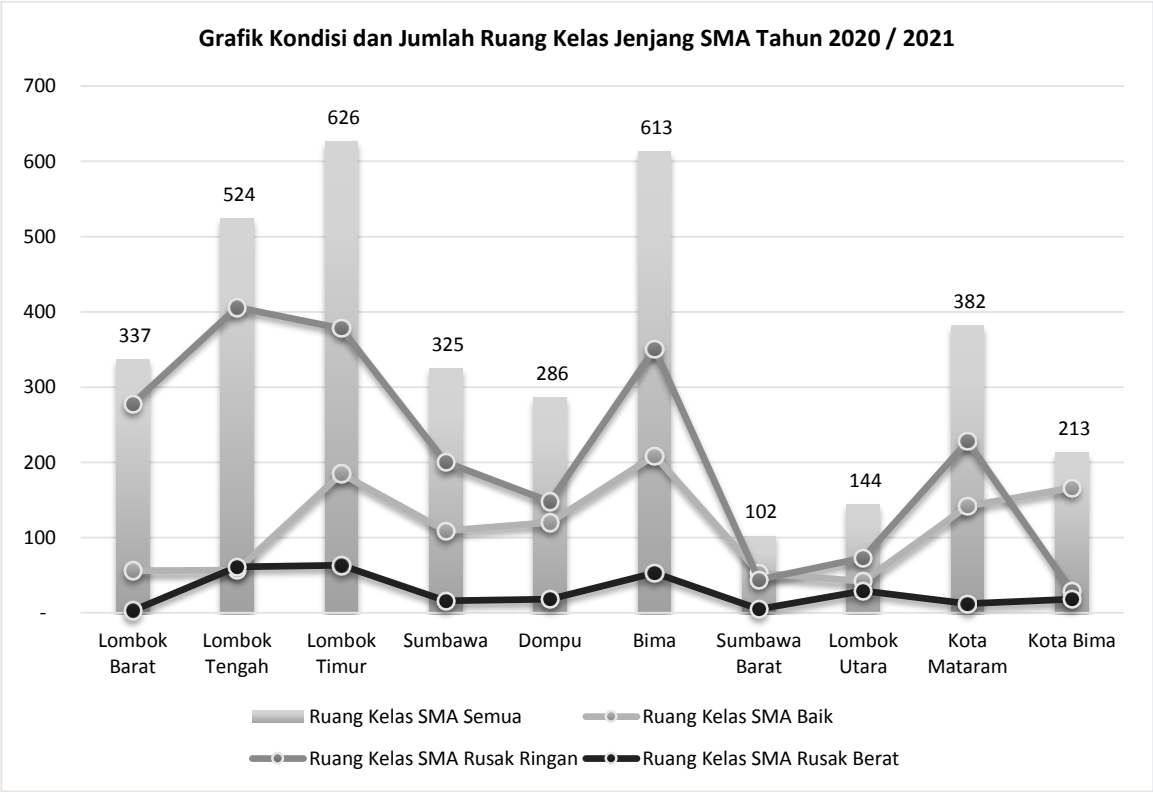
Jumlah Guru atau Tenaga Pendidik mencapai 9.907 (tidak termasuk guru tidak tetap) yang harus dipertimbangkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi mereka agar dapat memberikan layanan pendidikan yang baik di NTB.



Sumber : DAPODIK

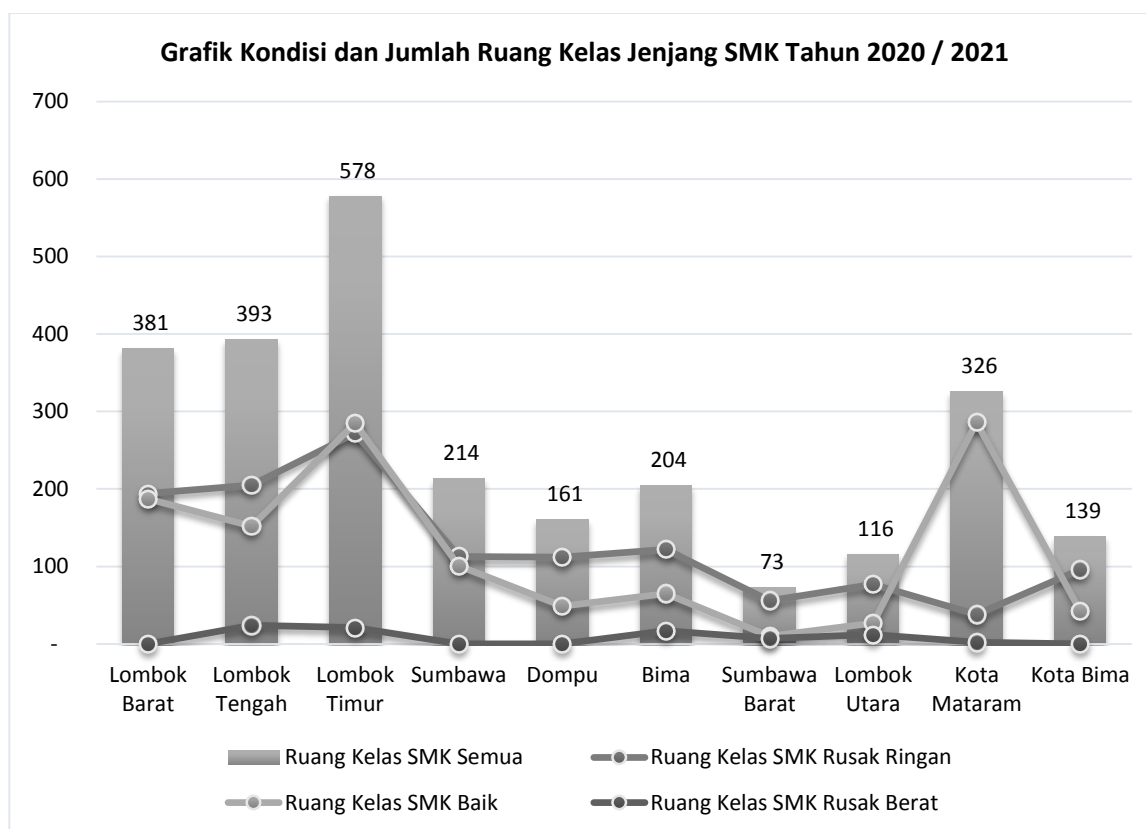
Gambar 1.1.4. Grafik Rasio Murid dan Guru SMA, dan SMK di Provinsi NTB Tahun 2021

Ruang Kelas yang tersedia harus ideal dengan jumlah penduduk usia sekolah; dimana saat ini tersedia 3,552 ruang kelas SMA dan 2,585 ruang kelas SMK dengan pemetaan kondisi ruang kelas SMA dalam kondisi rusak ringan 2,135 kelas, ruang kelas SMA dalam kondisi rusak berat 278, ruang kelas SMK dalam kondisi rusak ringan 1,285 kelas, dan ruang kelas SMK dalam kondisi rusak berat 83 kelas.



Sumber : DAPODIK

Gambar 1.1.5. Grafik Kondisi dan Jumlah Ruang Kelas Jenjang SMA Tahun 2020 / 2021



Sumber : DAPODIK

Gambar 1.1.6. Grafik Kondisi dan Jumlah Ruang Kelas Jenjang SMK Tahun 2020 / 2021

Itulah gambaran singkat sasaran pembangunan bidang pendidikan di NTB belum termasuk Anak Berkebutuhan Khusus yang mencapai 8,524 jiwa sampai dengan tahun 2021. Sasaran usia sekolah menengah yang terdaftar di Madrasah Aliah dan Pendidikan Kesetaraan lainnya yang tidak mungkin diabaikan, kesejahteraan guru tidak tetap, ruang kelas dan fasilitas belajar Madrasah Aliah dan program Kesetaraan lainnya.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB telah melaksanakan sejumlah program perluasan akses Pendidikan Menengah Atas sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Program – program tersebut di dukung oleh anggaran baik yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp. 1,205,298,953,454 pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar Rp. 1,240,254,550,830 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,257,305,198,489. Sedangkan realisasi keuangan dari tahun 2018 sebesar 95.27, tahun 2019 sebesar 96.04, dan tahun 2020 sebesar 78.85, realisasi fisik tahun 2018 mencapai 98.95 tahun 2019 mencapai 99.37, dan realisasi fisik tahun 2020 mencapai 89.32. Tahun Anggaran 2021, Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB sebesar Rp. 2,008,559,191,955,- Realisasi Keuangan mencapai Rp. 1,921,991,195,307,- atau sebesar 98.01 % sedangkan Realisasi Fisik mencapai 98.44 %.

Indikator pengukuran kinerja bukan hanya realisasi anggaran seperti di atas, Laporan Akuntabilitas ini perlu disusun dengan berpedoman kepada beberapa regulasi. Ketentuan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023;
12. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 Nomor :01/DPPA/TAPD/2020 Tanggal, 29 Agustus 2019.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 nomor :83/DPA/TAPD/2019 Tanggal, 26 Desember 2019;

Selain peraturan dan perundang – undangan di atas, secara menyeluruh LKJip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 akan mencakup semua Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Aspek - aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi potensi atau kekuatan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang kekuatan – kekuatan di dalam organisasi. Sedangkan disatu sisi terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan yang tentunya nanti mempengaruhi pencapaian tujuan atau pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan walaupun dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pembangunan pendidikan, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan pendidikan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan. Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang.

Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Secara umum strategi dipetakan kedalam

empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

- 1. **Perspektif Masyarakat / Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi.
- 2. **Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
- 3. **Perspektif Kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan jenis investasi kepada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
- 4. **Perspektif Keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Pendidikan NTB 5 tahun kedepan, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan misi dan tujuan pembangunan 2019 - 2023 sebagaimana tabel berikut;

Tabel 1.2.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan RPJMD Pemerintah Provinsi NTB

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan ditetapkan dalam RPJMD dalam Misi ketiga yaitu NTB Sehat dan Cerdas. Cerdas atau dalam bidang pendidikan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan yang diukur dengan angka Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka	Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang meliputi; Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Pendapatan. Khusus bidang pendidikan, arah kebijakan kepada pencapaian Indeks Pendidikan yang diukur

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Partisipasi. Kedua; meningkatkan capaian Standar Nasional Pendidikan yang diukur dengan Akreditasi Lembaga Sekolah.	dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan di amanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan menerapkan strategi Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus dengan indikator Angka Partisipasi, Daya Serap Lulusan, dan Angka Melanjutkan ke Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA, SMA LB, Paket C)	Arah kebijakan Dikbud NTB dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan menengah dimaksudkan untuk dapat menjangkau atau memberikan layanan pendidikan kepada semua kelompok usia 16 sd 18 tahun. Kemudian, daya tampung atau kemampuan lembaga sekolah tersebut di ukur dengan; 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus; 2) Angka Partisipasi Murni (APM); 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA, MA, SMK, Paket C; 4) Persentase Lulusan SMK yang terserap IDUKA; dan 5) Angka Melanjutkan SMA
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan yang kedua di amanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dengan menerapkan strategi Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan yang mencakup; standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian Pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan yang diukur dengan Akreditasi Sekolah.	Arah kebijakan Dikbud NTB dalam rangka Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan dilakukan untuk mencapai; 1) Nilai Akreditasi SMA Minimal B; 2) Nilai Akreditasi SMK Minimal B; dan 3) Nilai Akreditasi SLB Minimal B
Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat dan Iklim Demokrasi di NTB dilakukan dengan menerapkan strategi untuk menggerakkan budaya yang meliputi: Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Penerapan strategi diarahkan kepada pencapaian target Indeks Pembangunan Kebudayaan melalui Pengembangan,	Selanjutnya OPD pemegang amanah yaitu Dikbud NTB menerapkan strategi secara teknis yang terkait dengan kewenangan dan urusan bidang kebudayaan maka Dikbud NTB menerapkan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada satu dimensi (dari 7 dimensi kebudayaan) yaitu Dimensi Warisan Budaya

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Perlindungan, dan Pemanfaatan Obyek Kebudayaan. Di NTB, Strategi Dikbud NTB dalam rangka Pengembangan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Obyek Kebudayaan diterapkan secara merata kepada semua obyek, demikian juga dengan strategi pelibatan untuk semua masyarakat sehingga Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan dapat terlaksana	Karena jumlah obyek kebudayaan sangat banyak bahkan data terus bergerak karena dimensi budaya mencakup seluruh dimensi sosial. Dalam hal ini Dikbud NTB menetapkan arah kebijakan dan sesuai dengan kemampuan anggaran maka pengukuran bertumpu pada satu dimensi warisan budaya dengan indikator Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan

1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023, terdapat beberapa kesimpulan tentang isu strategis yaitu; NTB adalah Daerah Rawan Bencana; Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal; Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal; Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah; Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal; Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal; Pertumbuhan Pertanian dan Investasi relative lambat; Pembangunan Pariwisata terkena dampak Pandemi Covid-19; Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal; dan Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal. Khusus dalam bidang pendidikan, hampir semua permasalahan di atas akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemberian layanan pendidikan.

Isu Secara nasional, IPM Provinsi NTB tahun 2019 menduduki posisi 29 dari 34 provinsi; Sementara itu, Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA, SMK, Sederajat, dan PK-PLK) yang mengakibatkan jangkauan layanan pendidikan kepada semua kelompok usia terbatas atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di NTB; Selain itu, Penjabaran indikator sasaran dan indikator kinerja bidang Kebudayaan terlalu teknis sehingga perlu disinkronkan dengan program nasional kebudayaan. Selain tiga hal tersebut, permasalahan di NTB dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti geografis, kebencanaan, SDM, perekonomian dan lain – lainnya seperti di bawah ini.

1. NTB rawan bencana; jelas hal ini berpengaruh kepada layanan pendidikan. Saat gempa bumi terjadi, sebagian fasilitas gedung sekolah rusak bahkan rusak berat maka siswa tidak dapat bersekolah dengan fasilitas gedung yang memadai; ketersediaan infrastruktur mempengaruhi rasio kelas dengan jumlah siswa. Karena itu penting untuk menyesuaikan program pendidikan baik itu sebelum dan pasca bencana seperti mitigasi, healing, dan kemampuan bertahan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi NTB harus mengalokasikan anggaran rehabilitasi mental siswa, rehabilitasi gedung sekolah atau bahkan pembangunan gedung sekolah.
2. Mutu dan daya saing adalah masalah utama sehingga menjadi tujuan pada renstra 2019 - 2023 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan
3. Investasi relative lambat dan Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal yang tentu akan memperkecil daya serap lulusan menjadi bekerja,
4. Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses belajar tatap muka dibatasi sehingga harus berubah menjadi belajar daring yang belum tentu menjadi proses belajar yang berkualitas.
5. Bidang Pembinaan SMK; Minimnya guru dengan keahlian produktif, dan minimnya guru yang memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan dari lembaga akreditasi, minimnya Pelibatan dunia industri dan minimnya lapangan pekerjaan; minimnya pendidikan tentang entrepreneurship, dan minimnya digitalisasi belajar terlebih saat pandemi Covid 19;
6. Revitalisasi atau Re-engineering SMK belum optimal karena keterbatasan anggaran daerah;
7. Sebagian besar SMK sebenarnya telah menjalankan beberapa program Revitalisasi atau Re-engineering SMK, akan tetapi belum ada system dan management sehingga program tidak terpetakan, terlebih pada tahun 2021 terlaksana hanya Penyusunan dan Sosialisasi Pergub tentang Revitalisasi atau Re-engineering SMK;
8. Belum optimalnya akses, kualitas dan relevansi Pendidikan Khusus; Belum terpenuhinya jumlah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; Minimnya guru yang memiliki keahlian produktif yang memiliki kompetensi pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus; minimnya porsi iduka dan langkah persiapan lulusan PKPLK untuk memasuki dunia Iduka;
9. Minimnya sekolah yang menerapkan dan menyediakan fasilitas Inklusi;
10. Karakter orang tua dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan karakter dari ABK sendiri yang enggan masuk sekolah regular yang memiliki fasilitas inklusi;
11. Bidang Pembinaan Ketenagaan; Pentingnya memperhatikan pemetaan, pemerataan, penempatan, dan kemampuan guru di bidang IT yang relative rendah sehingga mempersulit dunia belajar digital terlebih masa pandemi Covid 19;
12. Isu penting dalam bidang pembinaan kebudayaan yaitu minimnya pengelolaan asset dan cagar budaya karena keterbatasan anggaran, Sistem budaya belum terintegrasi dalam

- kurikulum lokal, belum optimalnya digitalisasi atau system informasi untuk pengelolaan budaya, komunitas masyarakat mencampur budaya dengan agama sehingga memicu kerancuan bahkan komplik sosial, pelibatan masyarakat dalam mendaftar, memelihara, dan menggunakan budaya dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat sangat rendah;
13. Taman Budaya belum mampu mengakomodasi dan memfasilitasi sanggar dan pelaku seni yang tersebar di Provinsi NTB karena keterbatasan anggaran; Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap nilai dan aplikasi budaya dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat; karya seni dan budaya belum tereksplorasi dan terekspose keluar dan sulit untuk mendapatkan segmen pasar baik di kalangan domestic dan internasional;
 14. Museum belum mampu menjadi referensi idola karena kemasan dan koleksi museum cenderung statis; Digitalisasi dan visualisasi koleksi museum belum juga mampu menarik sehingga akses terbatas dan harus datang langsung ke tempat koleksi;
 15. Kantor Cabang Dinas masih bergantung sepenuhnya terhadap program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; sebaliknya program given masih minim dari provinsi, Minimnya inovasi, inisiatif, dan sinergitas program dengan OPD terkait bidang pendidikan. Seharusnya KCD menjadi pengganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Kabupaten dan Kota;
 16. Memaksimalkan Kantor Cabang Dinas, perlu menetapkan pondasi kinerja yang berawal dari dokumen Penilaian Kinerja yang terintegrasi mulai dari bawah yaitu sekolah sampai dengan system tertinggi di Dinas Pendidikan Provinsi;
 17. Isu tidak kalah pentingnya adalah isu migrasi system sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Migrasi berdampak pada pola penyusunan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, kinerja ASN, Tambahan Penghasilan ASN, dan lain – lainnya. Pada intinya, tahun 2021 akan banyak mengakibatkan penyesuaian program.

Selain permasalahan di atas, berikut ini dipetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan matrik indikator kinerja.

Tabel 1.3.1. Matrik Permasalahan Berdasarkan Pemetaan Indikator Kinerja

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
Misi ke 3 NTB SEHAT DAN CERDAS Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	1. Indeks pendidikan dibentuk dari indikator Capaian :
		2. Capaian Nilai Ujian Nasional. UN Terhapus berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No. 1/2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
		Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
		3. Angka Partisipasi Murni. Kewenangan Dikbud NTB sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 hanya SMA, SMK, dan PK. Sementara APM mencakup Jenjang Sekolah Menengah termasuk MA sehingga dipengaruhi oleh kinerja Kemenag Provinsi NTB.
		4. Peta Mutu Pendidikan. Penilaian dilaksanakan oleh UTP Pusat yaitu LPMP NTB
		5. Rasio Ruang Kelas : a. Setiap tahun terlaksana Penambahan Ruang dan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan DAK dan APBD (Aspirasi DPRD) b. Penetapan alokasi DAK Fisik berdasarkan DAPODIK. c. Dalam menjamin rasio ketersediaan Ruang Kelas yang baik Dikbud tidak mungkin membedakan Sekolah Negeri, Suasta, termasuk Madrasah Aliah harus menjadi sasaran sehingga sasaran sangat besar sementara DAK dan APBD sangat terbatas dan kemungkinan jika dievaluasi oleh Kemendagri maka ruang kelas MA tidak termasuk sasaran DIKBUD NTB
		6. Rata-Rata Lama Sekolah tidak dapat dihitung oleh DIKBUD NTB karena melibatkan variabel data dari Kabupaten Kota se NTB. Rata – Rata Lama Sekolah di hitung oleh BPS Provinsi NTB.

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminal	1. Indeks Kriminal diinginkan menurun dengan kegiatan kebudayaan. Relevan??? 2. Kemendikbud telah meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 3. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS).	1. HLS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Minimum 0 dan maksimum 18 tahun. 2. Kalkulasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang mencakup data siswa semua jenjang pendidikan sehingga harus mengumpulkan data dari seluruh kabupaten kota
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS).	1. RLS adalah rata-rata lama sekolah di suatu wilayah, x_i adalah lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah dan n jumlah

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
		penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) ($i=1, 2, 3, \dots, n$). 2. Kalkulasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang mencakup data siswa semua jenjang pendidikan sehingga harus mengumpulkan data dari seluruh kabupaten kota
Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	1. Belum dapat dihitung karena data belum lengkap 2. Perlu penyesuaian dengan IPK. Paling relevan yaitu dimensi “Warisan Budaya” karena sesuai dengan struktur Permendagri 90 Tahun 2019 yang terkait dengan Program Pengembangan Kebudayaan
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	Pengumpulan data harus berkoordinasi dengan Pengelola Pendidikan Kesetaraan dan Kementrian Agama untuk mengumpulkan data Madrasah Aliah
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	Pengumpulan data harus berkoordinasi dengan Pengelola Pendidikan Kesetaraan dan Kementrian Agama untuk mengumpulkan data Madrasah Aliah
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Kesulitan mendapatkan data dasar Populasi Penduduk dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai dengan Kelompok Usia
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Keterbatasan Anggaran, Sebaran Penduduk, Jumlah Ruang Kelas SLB tidak baku karena harus sesuai ketunaan ABK, Sebagian ruang kelas adalah kelas Madrasah, dan sebagainya seperti Belum tergambar kondisi fisik Ruang Kelas secara keseluruhan sehingga patokan utama adalah DAPODIK

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Terkadang data tidak lengkap di DAPODIK dan tidak bisa mengakses data base NUPTK
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Terkadang data tidak lengkap di DAPODIK dan tidak bisa mengakses data base NUPTK
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi sekolah dalam pencapaian standar akreditasi lembaga
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	Belum semua sekolah mengirimkan data siswa melanjutkan, adanya pandemi menyebabkan banyak siswa tidak mampu untuk melanjutkan
	Penurunan Angka DO SMA	Jumlah siswa DO tidak sinkron dengan DAPODIK karena pihak sekolah mempertimbangkan penghapusan siswa dari DAPODIK karena kemungkinan siswa DO masuk sekolah kembali.
	Persentase SMA yang direvitalisasi	Target tidak dapat dicapai karena untuk tahun 2021 dikonsentrasikan kepada penyediaan fasilitas secara maksimal pada masing-masing sekolah (konsep ketuntasan) bukan hanya ketersebaran semata
	Persentase Data Sarpras SMA yang tersedia	Data sudah tersedia dalam Dapodik namun perlu pengelolaan data yang lebih baik
	Persentase peserta didik yang menerima Layanan SPM bidang Pendidikan	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan telah mengusulkan pengajuan dana ke BPKAD namun dana yang tersedia hanya 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Persentase Pelaporan penggunaan dana BOS	Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMA	SDM Pengelola belum semuanya memiliki kompetensi, terbatasnya kemampuan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pengelola BOS, Sering terjadi pergantian pengelola BOS.
	Persentase pembinaan prestasi siswa	Terbatasnya kemampuan anggaran, Belum ada manajemen data,
	Persentase Data Peserta Didik SMA yang tersedia	Data sudah tersedia di DAPODIK namun perlu pengelolaan data
	Persentase Akreditasi SMA minimal B	Belum ada pengelolaan data sekolah terkait dengan manajemen dan analisis data akreditasi. Data akreditasi Berdasarkan Lap. Hasil akreditasi BAN SM
	Persentase Usulan pengajuan Izin Operasional yang disetujui	Target tidak mencapai 100% karena adanya regulasi baru terkait perizinan sekolah dimana dinas tidak diperbolehkan lagi menerbitkan izin sekolah dan penerbitan izin harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase SMA yang menerapkan SKS	Belum ada data dasar dan pengelolaan data
	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan
	Persentase Dokumen Kurikulum yang disyahkan	Terbatasnya kemampuan anggaran dan belum ada Tim Pengembang Kurikulum yang ditetapkan
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMA	Persentase akreditasi SMA Minimal B	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi sekolah dalam pencapaian standar akreditasi lembaga
	Penurunan DO SMA	Belum ada manajemen pengelolaan data DO Sekolah, Data di DAPODIK tidak riil karena harus konfirmasi dan menunggu batas waktu yang

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
		cukup untuk dapat mengkatagorikan siswa menjadi DO
	Persentase Angka Melanjutkan ke PT	Belum semua sekolah swasta mengirimkan data siswa melanjutkan, adanya pandemi menyebabkan banyak siswa tidak mampu untuk melanjutkan
	Persentase SMA yang direvitalisasi sarprasnya	target tidak dapat dicapai karena untuk tahun 2021 dokonsentrasikan kepada penyediaan fasilitas secara maksimal pada masing-masing sekolah (konsep ketuntasan) bukan hanya ketersebaran semata
	Jumlah peserta didik SMA yang menerima SPM Pendidikan (Alat tulis)	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan telah mengusulkan pengajuan dana ke BPKAD namun dana yang tersedia hanya 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Jumlah Siswa Penerima BOS	SDM Pengelola belum semuanya memiliki kompetensi, terbatasnya kemampuan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pengelola BOS, Sering terjadi pergantian pengelola BOS. Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK	Penurunan Angka DO SMK	Belum ada manajemen pengelolaan data DO Sekolah, Data di DAPODIK tidak riil karena harus konfirmasi dan menunggu batas waktu yang cukup untuk dapat mengkatagorikan siswa menjadi DO
	Persentase SMK yang direvitalisasi	Belum ada sumber dan manajemen pengelolaan data.
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD	Usulan telah disampaikan kepada Tim Penilai yang terdiri dari Sekda, Karo Ekonomi, Karo Hukum,

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
		inspektorat, Bappeda dan BPKAD namun hingga saat ini hasil penilaian belum keluar
	Persentase SMK memperoleh akreditasi minimal B	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi sekolah dalam pencapaian standar akreditasi lembaga
	Persentase Data Sarpras yang tersedia	Diperlukan SDM dan Tim pengelola karena Data sangat besar dan perlu penilaian untuk menjadi data BMD.
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data penerima terlambat diterima, dan anggaran yang tersedia hanya setengah sehingga tidak dieksekusi
	Jumlah Siswa penerima BOS	SDM Pengelola belum semuanya memiliki kompetensi, terbatasnya kemampuan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pengelola BOS, Sering terjadi pergantian pengelola BOS. Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase APK SLB	Kesulitan mendapatkan data dasar Populasi Penduduk dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai dengan Kelompok Usia
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung sekolah Inklusi, Terbatasnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Terbatasnya ABK memanfaatkan fasilitas Inklusi karena alasan psikologis dll.
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi sekolah dalam pencapaian standar akreditasi lembaga
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi sekolah dalam

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
		pencapaian standar akreditasi lembaga
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data terlambat diterima, anggaran yang tersedia hanya setengahnya
	Jumlah siswa penerima BOS	SDM Pengelola belum semuanya memiliki kompetensi, terbatasnya kemampuan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pengelola BOS, Sering terjadi pergantian pengelola BOS. Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Menengah	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Kurikulum disahkan	Belum ada tim khusus, Anggaran direfocusing
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah SMA yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Persentase Pengawas SMA bersertifikat Calon Pengawas (Cawas)	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Persentase Guru SMA yang berijazah minimal SI/ DIV	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
	Persentase Pendidik SMK minimal DIV/SI dan bersertifikat pendidik	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Persentase Guru SLB yang berijazah minimal SI/ DIV	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio guru terhadap peserta didik SMA	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMA, SMK, dan SLB	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PTK dan Tenaga Kebudayaan	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Swasta yang terpantau perizinannya	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
Diselenggarakan oleh Masyarakat		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang	Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Terbatasnya kemampuan anggaran untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan
Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Naskah Buku Bacaan, Modul dan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Daerah yang tersusun	Akibat Refokusing anggaran berdampak pada perolehan Juara yang seharusnya 6 orang menjadi 4 orang sehingga penghargaan pemerintah pada masyarakat tidak memenuhi target.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran
	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran

KINERJA, KONDISI, SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	Belum ada data yang komprehensif, Terbatasnya kemampuan anggaran

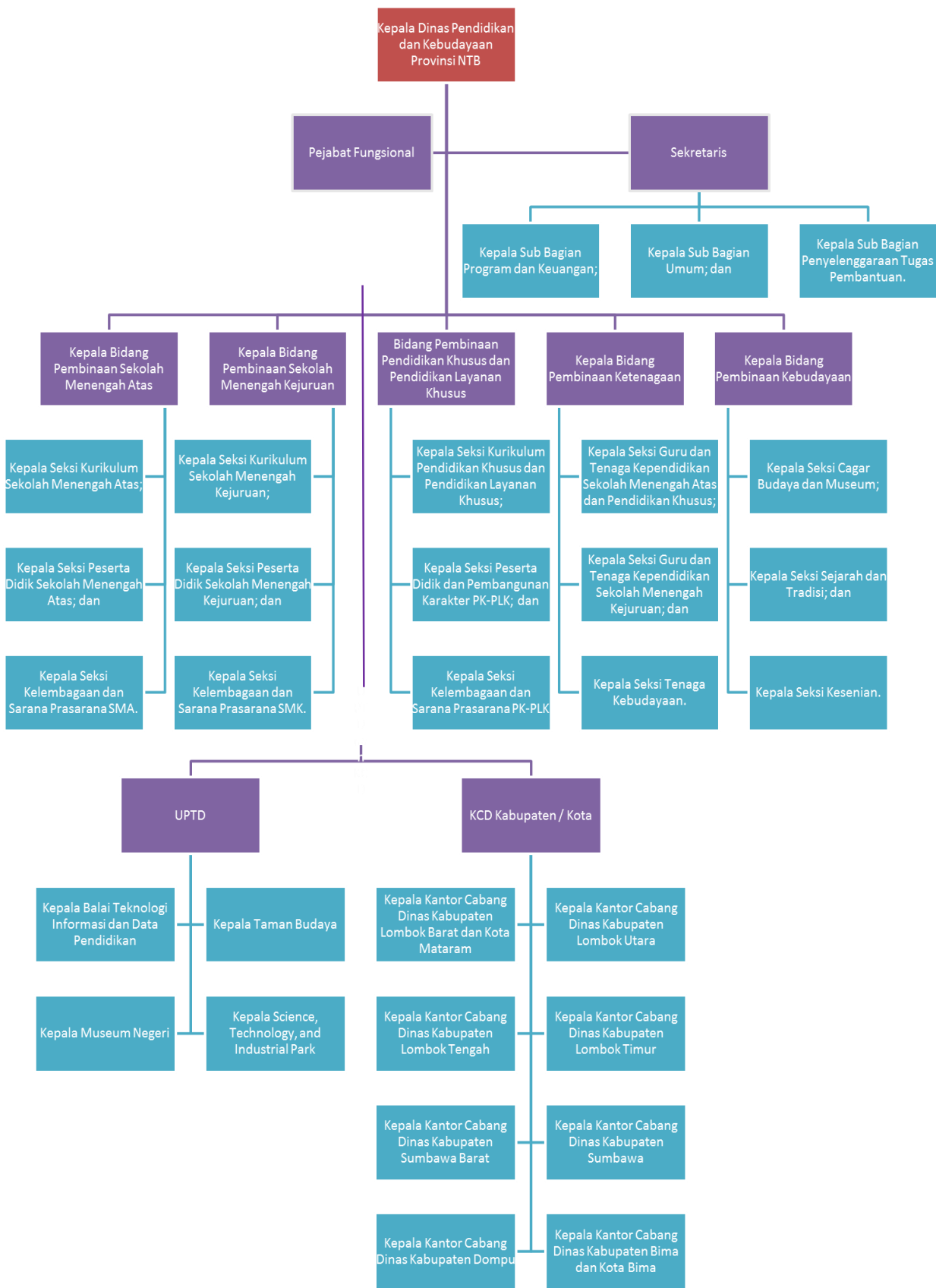
1.4. Struktur Organisasi

Selain gambaran umum organisasi, aspek strategis, dan berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan. Terdapat komponen lain yang dapat menggambarkan investasi sumber daya manusia, managemen atau pengelolaan pendidikan. Komponen ini adalah struktur organisasi, yang menggambarkan tugas fungsi, tata kelola personel dan lembaga pendidikan di NTB, bahkan yang paling penting adalah untuk menggambarkan Indikator Kinerja. Dengan demikian Ruang lingkup LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2020 meliputi capaian kinerja lingkup pimpinan bidang - bidang dan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB sebagaimana di bawah ini

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris,
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan
5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Khusus
6. Kepala Bidang Pengelolaan Ketenagaan
7. Kepala Bidang Pengelolaan Kebudayaan
8. UPTD
 - a. Kepala BTIDP
 - b. Kepala MUSEUM
 - c. Kepala TAMAN BUDAYA
 - d. Kepala STIP
9. KCD
 - a. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram
 - b. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Lombok Utara
 - c. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Lombok Tengah
 - d. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Lombok Timur
 - e. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Sumbawa Barat

- f. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Sumbawa
- g. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Dompu
- h. Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bima dan Kota Bima

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGAGRA BARAT



Gambar 1.4.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2019 sebagaimana gambar di atas.

1.5.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas untuk Merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataanbidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pembinaan Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

1. Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan dan koordinasi,
2. Perumusan bahan telaahan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, penyempurnaan, penyusunan analisis kebijakan pendidikan;
3. Perumusan bahan kajian, analisis jabatan, evaluasi dan standar kompetensi jabatan;
4. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kebudayaan Provinsi, Kabupaten dan Kota
5. Pengkajian bahan analisis dan penilaian kinerja pengembangan serta penyempurnaan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pengelolaan pendidikan dan kebudayaan;
6. Perumusan bahan kajian penataan di Bidang SMA, Bidang SMK, Bidang PK-PLK, Bidang Kebudayaan dan Bidang Ketenagaan
7. Pengkajian bahan laporan kinerja instansi pemerintah.

1.5.2. Fungsional Perencana

Fungsional Perencana melaksanakan tugas; Membantu Kepala Dinas, Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan pendidikan, evaluasi dan analisa perencanaan pendidikan. Fungsional Perencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari empat orang, dua orang perencana Madya, satu orang perencana Muda dan satu orang perencana pertama, fungsioanal perencanaberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

1. Identifikasi permasalahan;
2. Rumusan alternatif kebijakan;
3. Pengkajian Alternatif;

4. Penentuan alternatif dan rencana;
5. Pengendalian pelaksanaan;
6. Penilaian hasil pelaksanaan.

1.5.3. Sekretaris

Sekretaris melaksanakan tugas; Membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
4. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
7. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah, kerja sama fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;

11. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Dikbud.

Sekretaris membawahi Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

1. Kepala Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai Tugas; Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas; Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - iii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - iv. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - v. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - vi. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - vii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - viii. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- i. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- ii. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- iii. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- iv. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- v. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- vi. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- vii. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - i. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - ii. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - iii. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - iv. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - v. Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - vi. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - vii. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Pembantuan

Mempunyai tugas untuk: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Peningkatan Pelayanan BLUD. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - ii. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - iii. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - iv. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - v. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - vi. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - vii. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - viii. Pemindahan Tugas ASN
 - ix. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- x. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- xi. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - vii. Penyediaan Bahan/Material
 - viii. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - ix. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - x. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - xi. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - iii. Pengadaan Alat Besar
 - iv. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - v. Pengadaan Mebel
 - vi. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - vii. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - viii. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - ix. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - x. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - xi. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- iii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- iv. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- v. Pemeliharaan Mebel
- vi. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- vii. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- viii. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- ix. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- x. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- xi. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- xii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- f. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - i. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

1.5.4. Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas

1. Kepala Bidang Sekolah Menengah

Kepala bidang Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas untuk; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meliputi; Sarana dan Prasarana, Peserta Didik, Kurikulum, dan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas
 - i. Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang
 - ii. Rehabilitasi Ruangan Sekolah
 - iii. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
- b. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 - i. Pengelolaan Biaya, Dana BOS, Proses Belajar dan Ujian Sekolah Menengah Atas
 - ii. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sekolah Menengah Atas
- c. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas
 - i. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - ii. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Bidang Pembinaan Menengah Atas, membawahi Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas, Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas, dan Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas. Masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Atas dengan Rincian Tugas dan Fungsi sebagaimana di bawah ini.

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas untuk; Pengelolaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang, Rehabilitasi Ruangan Sekolah, dan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

a. Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang

- i. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
- ii. Penambahan Ruang Kelas Baru
- iii. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- iv. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
- v. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
- vi. Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
- vii. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
- viii. Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
- ix. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
- x. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- xi. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- xii. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
- xiii. Pembangunan Asrama Sekolah
- xiv. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- xv. Pembangunan Fasilitas Parkir
- xvi. Pembangunan Kantin Sekolah
- xvii. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- xviii. Pembangunan Ruang/Sudut Baca

b. Rehabilitasi Ruangan Sekolah

- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- ii. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- iii. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
- iv. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika

- v. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
- vi. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
- vii. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
- viii. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
- ix. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- x. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- xi. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- xii. Rehabilitasi Asrama Sekolah
- xiii. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- xiv. Rehabilitasi Fasilitas Parkir
- xv. Rehabilitasi Kantin Sekolah
- xvi. Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- xvii. Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
- c. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
 - i. Pengadaan Mebel Sekolah
 - ii. Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
 - iii. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - iv. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - v. Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
 - vi. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - vii. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
 - viii. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - ix. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - x. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - xi. Pemeliharaan Mebel Sekolah

2. Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas; Pengelolaan Biaya, Proses Belajar, Ujian, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengelolaan Biaya, Dana BOS, Proses Belajar dan Ujian Sekolah Menengah Atas
 - i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 - ii. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

- iii. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
- iv. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
- b. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sekolah Menengah Atas
 - i. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
 - ii. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - iii. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas

3. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas

Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas; Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Rincian tugas Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Atas, adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - i. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - ii. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - iii. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - iv.** Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
- b. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - i. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - ii. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1.5.5. Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan

1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

Kepala bidang Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas untuk; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi; Sarana dan Prasarana, Peserta Didik, Kurikulum, dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang

- ii. Rehabilitasi Ruang Sekolah
- iii. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
- b. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Pengelolaan Biaya, Dana BOS, Proses Belajar dan Ujian Sekolah Menengah Kejuruan
 - ii. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - ii. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Bidang Pembinaan Menengah Kejuruan, membawahi Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan, dan Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. Masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Rincian Tugas dan Fungsi sebagaimana di bawah ini.

2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas untuk; Pengelolaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang, Rehabilitasi Ruang Sekolah, dan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang
 - i. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - ii. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - iii. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - iv. Pembangunan Ruang Praktik Siswa
 - v. Pembangunan Ruang Laboratorium
 - vi. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - vii. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - viii. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - ix. Pembangunan Asrama Sekolah
 - x. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - xi. Pembangunan Fasilitas Parkir
 - xii. Pembangunan Kantin Sekolah
 - xiii. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

- xiv. Pembangunan Ruang/Sudut Baca
 - b. Rehabilitasi Ruangan Sekolah
 - i. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
 - ii. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - iii. Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
 - iv. Rehabilitasi Ruang Laboratorium
 - v. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - vi. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
 - vii. Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
 - viii. Rehabilitasi Asrama Sekolah
 - ix. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - x. Rehabilitasi Fasilitas Parkir
 - xi. Rehabilitasi Kantin Sekolah
 - xii. Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - xiii. Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
 - c. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
 - i. Pengadaan Mebel Sekolah
 - ii. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
 - iii. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - iv. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - v. Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
 - vi. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - vii. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
 - viii. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - ix. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

3. Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan

Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas; Pengelolaan Biaya, Proses Belajar, Ujian, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengelolaan Biaya, Dana BOS, Proses Belajar dan Ujian Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
 - ii. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

- iii. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- iv. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
 - ii. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - iii. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

4. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas; Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Rincian tugas Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - i. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - ii. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - iii. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - iv.** Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
- b. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - i. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - ii. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1.5.6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Khusus

1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Khusus

Kepala bidang Pengelolaan Pendidikan Khusus melaksanakan tugas untuk; Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Khusus yang meliputi; Sarana dan Prasarana, Peserta Didik, Kurikulum, dan Kelembagaan Pendidikan Khusus. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus
 - i. Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang
 - ii. Rehabilitasi Ruangan Sekolah

- iii. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
- b. Pengelolaan Peserta Didik Pendidikan Khusus
 - i. Pengelolaan Biaya, Dana BOS, Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Khusus
 - ii. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Khusus
- c. Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Khusus
 - i. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - ii. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Bidang Pengelolaan Pendidikan Khusus, membawahi Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus, Seksi Peserta Didik Pendidikan Khusus, dan Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus. Masing-masing seksi di pimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Pendidikan Khusus dengan Rincian Tugas dan Fungsi sebagaimana di bawah ini.

2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus melaksanakan tugas untuk; Pengelolaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang, Rehabilitasi Ruangan Sekolah, dan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang
 - i. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 - ii. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - iii. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - iv. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - v. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - vi. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - vii. Pembangunan Asrama Sekolah
 - viii. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - ix. Pembangunan Fasilitas Parkir
 - x. Pembangunan Kantin Sekolah
 - xi. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - xii. Pembangunan Ruang Laboratorium
 - xiii. Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
 - xiv. Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
 - xv. Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)

- xvi. Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
- xvii. Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
- xviii. Rehabilitasi Ruangan Sekolah
- b. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
 - i. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - ii. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - iii. Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
 - iv. Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
 - v. Rehabilitasi Asrama Sekolah
 - vi. Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - vii. Rehabilitasi Fasilitas Parkir
 - viii. Rehabilitasi Kantin Sekolah
 - ix. Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 - x. Rehabilitasi Ruang Laboratorium
 - xi. Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
 - xii. Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
 - xiii. Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
 - xiv. Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
 - xv. Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
 - xvi. Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
- c. Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah
 - i. Pengadaan Mebel Sekolah
 - ii. Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
 - iii. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - iv. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - v. Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
 - vi. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - vii. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
 - viii. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - ix. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

3. Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Khusus

Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Khusus melaksanakan tugas; Pengelolaan Biaya, Proses Belajar, Ujian, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengelolaan Biaya, Dana BOS, Proses Belajar dan Ujian Pendidikan Khusus
 - i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
 - ii. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - iii. Pengelolaan Dana BOS Pendidikan Khusus
 - iv. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Pendidikan Khusus
- b. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Khusus
 - i. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
 - ii. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - iii. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Khusus

4. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus

Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus melaksanakan tugas; Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah, dan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Rincian tugas Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus, adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - i. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - ii. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - iii. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - iv. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
- b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - i. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - ii. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - iii. Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1.5.7. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan bertugas untuk; 1) Melaksanakan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2) Penataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi
- b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah, Pendidikan Khusus, dan Tenaga Kebudayaan
- d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dan Tenaga Kebudayaan

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, 2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan 3) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas; 1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi, 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, dan 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi
 - i. Perhitungan dan Pemetaan Pengawas Sekolah Menengah Atas
 - ii. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - iii. Perhitungan dan Pemetaan Guru Mapel Sekolah Menengah Atas
 - iv. Perhitungan dan Pemetaan TU, Penjaga, Cleaning Service, Security, Operator, Teknisi, dll di Sekolah Menengah Atas
- b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

- i. Penataan dan Pendistribusian Pengawas Sekolah Menengah Atas
- ii. Penataan dan Pendistribusian Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas
- iii. Penataan dan Pendistribusian TU, Penjaga, Cleaning Service, Security, Operator, Teknisi, dll di Sekolah Menengah Atas
- c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
- d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas; 1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi, 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota (satu) Provinsi
 - i. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK
 - ii. Perhitungan dan Pemetaan Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan
 - iii. Perhitungan dan Pemetaan Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan
 - iv. Perhitungan Pendidik dan Pemetaan Vocasi Sekolah Menengah Kejuruan
 - v. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Ahli / Tamu Sekolah Menengah Kejuruan
 - vi. Pengumpulan Data Perhitungan dan Pemetaan Core Sekolah Menengah Kejuruan
 - vii. Pemetaan Kompetensi Calon Kepala SMK Berdasarkan Core Area
 - viii. Perhitungan dan Pemetaan TU, Penjaga, Cleaning Service, Security, Operator, Teknisi, dll pada Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - i. Penataan dan Pendistribusian Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan
 - ii. Penataan dan Pendistribusian Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan
 - iii. Penataan dan Pendistribusian Pendidik Vocasi Sekolah Menengah Kejuruan
 - iv. Penataan dan Pendistribusian Pendidik Ahli / Tamu Sekolah Menengah Kejuruan
 - v. Desain Aplikasi Penataan dan Pendistribusian PTK dan Core Sekolah Menengah Kejuruan

- vi. Penataan dan Pendistribusian Calon Kepala SMK Berdasarkan Core Area
- vii.** Penataan dan Pendistribusian TU, Penjaga, Cleaning Sevice, Scurity, Operator, Teknisi, dll di Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- 4. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus melaksanakan tugas; 1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi, 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, dan 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota (satu) Provinsi
 - i. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus
 - ii. Perhitungan dan Pemetaan Pengawas Pendidikan Khusus
 - iii. Perhitungan dan Pemetaan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Khusus
 - iv. Perhitungan dan Pemetaan TU, Penjaga, Cleaning Sevice, Scurity, Operator, Teknisi, dll pada satuan Pendidikan Khusus
- b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
 - i. Penataan dan Pendistribusian Pengawas Pendidikan Khusus
 - ii. Penataan dan Pendistribusian Guru Mapel SLB
 - iii.** Penataan dan Pendistribusian TU, Penjaga, Cleaning Sevice, Scurity, Operator, Teknisi, dll pada satuan Pendidikan Khusus
- c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus
- d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus

1.5.8. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan

1. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan

Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan melaksanakan tugas; 1) Pengembangan Bahasa dan Sastra, 2) Pengelolaan Kebudayaan, 3) Pembinaan Kesenian, 4) Pembinaan Sejarah Lokal, dan 5) Pengelolaan Cagar Budaya. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra,
- b. Pengembangan Kebudayaan,
- c. Pembinaan Kesenian Tradisional,
- d. Pembinaan Sejarah, dan
- e. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan membawahi 1) Seksi Cagar Budaya dan Museum, 2) Seksi Sejarah dan Tradisi, dan 3) Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan dengan rincian tugas dan fungsi sebagaimana di bawah ini.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Cagar Budaya

Kepala Seksi Pengelolaan Cagar Budaya melaksanakan tugas; Pengelolaan Kebudayaan. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - i. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
 - ii. Pelindungan Cagar Budaya
 - iii. Pengembangan Cagar Budaya
 - iv. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

3. Seksi Sejarah dan Tradisi

Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas; 1) Pembinaan Sejarah dan 2) Pengembangan Bahasa dan Sastra. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pembinaan Sejarah
 - i. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
 - ii. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
 - iii. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
- b. Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi
 - i. Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
 - ii. Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
 - iii. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
 - iv. Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
 - v. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi

- vi. Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
 - vii. Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
4. Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan

Kepala Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan melaksanakan tugas; Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan. Selanjutnya dijabarkan dalam fungsi di bawah ini.

- a. Pengembangan Kesenian Tradisional
 - i. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- b. Pengembangan Kebudayaan
 - i. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - ii. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - iii. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - iv. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - v. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
 - vi. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 - vii. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

1.5.9. Balai Teknologi, Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP)

1. Kepala

Kepala Balai Teknologi, Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP) Melaksanakan tugas; teknis Dinas Pendidikan dan kebudayaan bidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.

- a. Tata Usaha Balai
- b. Penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan bagi Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan bagi Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus;
- d. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan bagi Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus;

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) membawahi Sub bagian Tata Usaha; Seksi Pemanfaatan; dan Seksi Evaluasi; Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) dengan rincian tugas dan fungsi berikut ini.

2. Kepala Tata Usaha BTIDP

Seksi bagian Tata Usaha Mempunyai tugas Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian lingkup Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Perlengkapan dan dokumentasi perundang-undangan. Rincian tugas Sub bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - iv. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - v. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - vi. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - iv. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - i. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - v. Penyediaan Bahan/Material
 - vi. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - vii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - viii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ix. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 3. Seksi Pemanfaatan

Kepala Seksi Pemanfaatan melaksanakan tugas; Perencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi kepada Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana berikut ini.

- a. Penyusunan rencana, Pengelolaan, dan Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus
 - i. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus
 - ii. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus
 - iii. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Teknologi Informasi bagi siswa Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus
- c. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan kepada Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus
- d. Pengumpulan Data Pendidikan dan Penyajian Data melalui media Teknologi dan Informasi
- 4. Seksi Evaluasi

Kepala Seksi Evaluasi melaksanakan tugas; Pemantauan, Evaluasi Pemanfaatan, dan Analisis Data Pendidikan dan Penyajian Data Melalui Teknologi Informasi. Rincian tugas Seksi Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana Pemantauan, Evaluasi Pemanfaatan, dan Analisis Data Pendidikan dan Penyajian Data Melalui Teknologi Informasi,
- b. Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian dan Validasi Data Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,
- c. Monitoring, Evaluasi dan Validasi Pasca Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus

- d. Penyajian Data dan Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus

1.5.10. Museum

1. Kepala
 - a. Menyusun bahan / materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan,
 - b. Menyusun kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, penilaian, pemasaran, analisis, evaluasi, pengawasan, pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan pada Museum Negeri.
2. Kasubbag Tata Usaha
 - a. Menyiapkan bahan / materi kebijakan, rencana/ program,
 - b. Koordinasi, pembinaan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan kegiatan ketatausahaan pada Museum Negeri.
3. Kepala Seksi Pengkajian dan Perawatan
 - a. Menyiapkan bahan / materi kebijakan, rencana/ program,
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan,koordinasi, pengendalian, pembinaan, penilaian, pemasaran, analisis, evaluasi, pengawasan, pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan kegiatan Pengkajian dan Perawatan pada Museum Negeri.
4. Kepala Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi
 - a. Menyiapkan bahan / materi kebijakan, rencana/ program,
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan,koordinasi, pengendalian, pembinaan, penilaian, pemasaran, analisis, evaluasi, pengawasan, pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan kegiatan Penyajian dan Layanan Edukasi pada Museum Negeri

1.5.11. Kantor Cabang Dinas

Dalam rangka *melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan kebudayaan di bidang SMA, SMK dan PK-PLK di Kabupaten atau Kota Madya*, Dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki kantor Cabang yaitu; 1) Kantor Cabang Dinas (KCD) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, 2) KCD Kabupaten Lombok Utara, 3) KCD Kabupaten Lombok Tengah, 4) KCD Kabupaten Lombok Timur, 5) KCD Kabupaten Sumbawa Barat, 6) KCD Kabupaten Sumbawa, 7) KCD Kabupaten Dompu, dan 8) KCD Kabupaten Bima dan Kota Bima. Semua kantor cabang memiliki uraian tugas yang sama dan jabaran fungsi yang sama sebagaimana berikut ini;

1. Penyusunan rencana pengelolaan SMA, SMK dan PK-PLK di Kabupaten atau Kota;
2. Pengelolaan SMA, SMK dan PK-PLK di Kabupaten atau Kota;
3. Pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan SMA, SMK dan PK-PLK di Kabupaten / Kota;
4. Pelaksanaan ketata usahaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengkoordinasian dan/atau kerjasama dengan stakeholders berkaitan dengan pengelolaan SMA, SMK dan SLB (PK-PLK);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh dalam mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang periode 2018-2023. Amanah yang diberikan melalui misi NTB Sehat & Cerdas serta NTB Aman & Berkah dijadikan pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tujuan renstra 2019 - 2023 yaitu *Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Menanamkan Nilai Sosial Budaya*. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Tabel 2.1.1.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA, MA, SMK, Paket C APM SMA, MA, SMK, Paket C APK SLB Persentase Lulusan SMK yang terserap

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
			Persentase Angka Melanjutkan SMA
		Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi SMA Minimal B
			Persentase Nilai Akreditasi SMK Minimal B
			Persentase Nilai Akreditasi SLB Minimal B
Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat dan Iklim Demokrasi	Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Warisan Budaya		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan

Tabel 2.1.2. Strategi, dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Dalam Pencapaian Kinerja Periode 2019 sd. 2023

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan : Terwujudnya Jangkauan Layanan Pendidikan yang berkualitas	
Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
Peningkatan Aksesibilitas layanan SMA, MA, SMK, Paket C di Provinsi NTB dilakukan dengan Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Kasar SMA, MA, SMK, Paket C di Provinsi NTB, 2) Menetapkan target APK selama 5 tahun (sesuai RPJMD), 3) Menetapkan data dasar yaitu data penduduk usia 16 sd 18 tahun yang berasal dari sensus penduduk yang telah direlease oleh BPS NTB, 4) Bekerja sama dengan department terekait seperti Kemenag dan pengelola pendidikan setara SMA lainnya untuk mengakomodir sasaran kelompok usia sekolah menengah	Berbagai kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Dikbud NTB yaitu; 1) Memberikan akses untuk bersekolah kepada semua penduduk yang berusia 16 sd 18 tahun melalui SMA dan SMK, 2) Memberikan akses untuk bersekolah kepada penduduk yang putus sekolah menengah melalui SMA Terbuka dan SMA Afirmasi, 3) Memberikan akses kepada penduduk yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di SMA LB,

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas layanan SMA, MA, SMK, Paket C di Provinsi NTB dilakukan dengan ; 1) Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA, MA, SMK, Paket C di Provinsi NTB; 2) Menetapkan target APM selama 5 tahun (sesuai RPJMD), 3) Menetapkan data dasar yaitu data Penduduk Usia 16 sd 18 tahun berdasarkan Kecamatan dan Kabupaten / Kota yang berasal dari data sensus penduduk yang telah direlease oleh BPS NTB, 4) Bekerja sama dengan department terekait seperti Kemenag dan pengelola pendidikan setara SMA lainnya untuk mengakomodir sasaran kelompok usia 16 sd 18 tahun untk bersekolah di jenjang sekolah menengah	Berbagai kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Dikbud NTB yaitu; 1) Memberikan akses untuk bersekolah kepada semua penduduk berusia 16 sd 18 tahun melalui SMA dan SMK, 2) Memberikan akses bersekolah kepada penduduk yang berusia 16 sd 18 tahun yang putus sekolah menengah melalui SMA Terbuka dan SMA Afirmasi, 3) Memberikan akses kepada penduduk yang berusia 16 sd 18 tahun yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di SMA LB, 4) Mengupayakan SMA dan SMK dengan rasio 1 : 1 disetiap Kecamatan, 5) Membuka layanan SMA terbuka, SMA Afirmasi, SMA LB sesuai dengan konsentrasi data kelompok usia 16 sd 18 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan menengah, 5) Melaksanakan penambahan dan revitalisasi ruang kelas sesuai dengan rasio jumlah siswa dan kondisi kerusakan ruang kelas
Peningkatan Aksesibilitas layanan SMA, MA, SMK, Paket C di Provinsi NTB dilakukan dengan Strategi; 1) Peningkatan APK SLB; 2) Bekerja sama dengan Instansi terkait seperti BPS dan Dinas Sosial untuk mendapatkan data sasaran siswa / Anak Berkebutuhan Khusus, 3) Memberikan kesempatan kepada lembaga masyarakat yang berpotensi membuka sekolah SMA LB, 4) Mengembangkan Sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dan fasilitas layanan berdasarkan jenis ketunaan siswa	Berbagai kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Dikbud NTB yaitu; 1) Memberikan akses untuk bersekolah kepada penduduk yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di SMA LB, 2) Membuka layanan SMA LB sesuai dengan konsentrasi data kelompok usia 16 sd 18 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, 3) Melaksanakan penambahan dan revitalisasi ruang kelas sesuai dengan rasio jumlah siswa dan kondisi kerusakan ruang kelas
Peningkatan Aksesibilitas layanan SMA, MA, SMK, Paket C di NTB dengan Strategi; 1) Peningkatan Persentase Lulusan SMK yang Terserap di Industri, Dunia Kerja, dan Dunia Usaha (IDUKA) di provinsi NTB, 2) Peningkatan kualitas kurikulum, kerja sama dengan Industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), kualitas pendidik, fasilitas, dan kualitas lulusan.	Kebijakan yang dilaksanakan yaitu dalam bentuk Revitalisasi SMK yang mencakup komponen komponen kurikulum, kerja sama dengan Industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), kualitas pendidik, fasilitas, dan kualitas lulusan.
Dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas layanan SMA, MA, SMK, Paket C di Provinsi NTB dilakukan dengan Strategi; 1) Peningkatan Persentase Siswa SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Kebijakan yang dilaksanakan bersama dengan perguruan tinggi yaitu memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan promosi jurusan di sekolah. Khusus Dikbud NTB menempuh kebijakan dengan memberikan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
yang dilaksanakan dengan menerapkan strategi bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pembinaan bakat dan minat siswa	apresiasi dan penghargaan kepada siswa yang memiliki bakat dan minat tertentu atau kepada siswa yang telah mampu berkompetisi dalam lomba – lomba bidang studi baik ditingkat daerah, nasional, dan internasional.
Sasaran : Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	
Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan dengan; 1. Meningkatkan Persentase SMA Bernilai Akreditasi Minimal B, 2) Peningkatan 8 SNP yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan	Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dikbud NTB; 1) Refitalisasi SMA dan SMK, 2) Memfasilitasi sekolah dalam peningkatan 8 SNP sesuai dengan Program, Kegiatan, dan Anggaran pada Dikbud NTB, 3) Mendorong sekolah untuk melaksanakan penilaian akreditasi sehingga mencapai nilai minimal yang telah ditetapkan dalam RPJMD, 4) Bekerjasama dengan lembaga penilai Akreditasi Sekolah untuk melaksanakan akreditasi, 5) Menjadikan nilai akreditasi sekolah untuk menentukan kebijakan pembinaan dan peningkatan kualitas sekolah.
2. Persentase SMK Bernilai Akreditasi Minimal B	
3. Persentase SLB Bernilai Akreditasi Minimal B	
Tujuan : Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat dan Iklim Demokrasi	
Sasaran : Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan	
Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan diterapkan strategi; 1) Peningkatan Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dikbud NTB; 1) Pelibatan siswa sekolah menengah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran

keberhasilan yang digunakan, bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja.

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi NTB atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2019- 2023 dalam bidang pendidikan tertuang dalam misi NTB yang 3 yaitu NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Tujuan yang ditetapkan Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing, dan yang menjadi Indikator Tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Gubernur NTB dalam bidang pendidikan adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian					Akhir (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	68.07	68.84	69.61	70.38	71.15	71.15
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	%	13.57	13.62	13.68	13.73	13.79	13.79
	Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	%	6.96	6.98	7.01	7.04	7.07	7.07

Sebagaimana tabel di atas, berikut ini dicantumkan target Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Khusus Target tahun 2021 dapat dibaca pada kolom kelima.

Tabel 2.1.2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Th.	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79
2	Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Th.	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07
3	Meningkatnya Aksesibilitas	APK SMA, MA, SMK, Paket C	%	98.13	98.63	99.15	99.95	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	APM SMA, MA, SMK, Paket C	%	90.50	92.42	93.40	95.28	95.28
		APK SLB	%	68.44	69	69.40	70	70.60
		Persentase Lulusan SMK yang terserap	%	-	-	10	12	15
		Persentase Angka Melanjutkan SMA	%	-	-	60	65	70
4	Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	Persentase Nilai Akreditasi SMA Minimal B	%	75.20	75.70	76.20	76.70	77.50
		Persentase Nilai Akreditasi SMK Minimal B	%	63.12	66.90	70.68	74.46	75
		Persentase Nilai Akreditasi SLB Minimal B	%	24	28	32	36	40
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Warisan Budaya							
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan	%	20	24,35	28,70	33,04	37,39

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum; Pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Demikian juga dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan menjadi Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021. Terkait ini, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTB telah menetapkan IKU sebagai indikator atau ukuran keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,, 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
1	2	3	4
1	Meningkatnya Aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	1 APK SMA, MA, SMK, Paket C	99.15 %
		2 APM SMA, MA, SMK, Paket C	93.40 %
		3 APK SLB	69.40 %
		4 Persentase Lulusan SMK yang terserap	10 %
		5 Persentase Angka Melanjutkan SMA	60 %
2	Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	6 Persentase Nilai Akreditasi SMA Minimal B	76.20 %
		7 Persentase Nilai Akreditasi SMK Minimal B	70.68 %
		8 Persentase Nilai Akreditasi SLB Minimal B	32 %
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan kebudayaan	9 Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan	28,70 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 2,001,774,132,239	Sumber Dana : APBD mendukung Sasaran Strategis No. 1 dan 2 indikator kinerja No. 1 sd. 8
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 6,766,260,280	Sumber Dana : APBD mendukung Sasaran Strategis No. 3 indikator kinerja No. 9

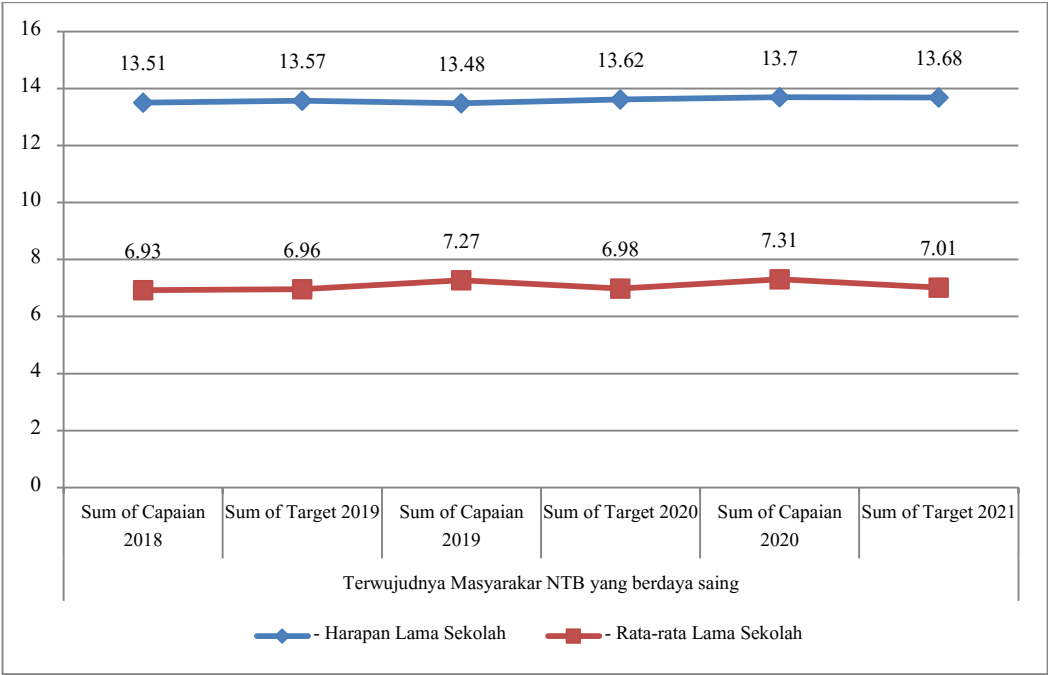
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Landasan penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB adalah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023, dokumen Penetapan Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020. LKjIP ini juga menguraikan informasi pelaksanaan, pencapaian sasaran strategis dan indikator keberhasilan; dan didasarkan pada hasil Pengukuran Kinerja dan pencapaian target Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan NTB Gemilang untuk Visi dan Misi ke 3 "NTB Sehat dan Cerdas sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD NTB Periode 2019 – 2023. Ditetapkan tujuan yaitu " ***“Terwujudnya Masyarakat NTB yang berdaya saing”*** dengan indikator kinerja yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata - Rata Lama Sekolah (RLS). Dalam grafik di bawah ini ditampilkan grafik target dan pencapaian sebagai berikut.



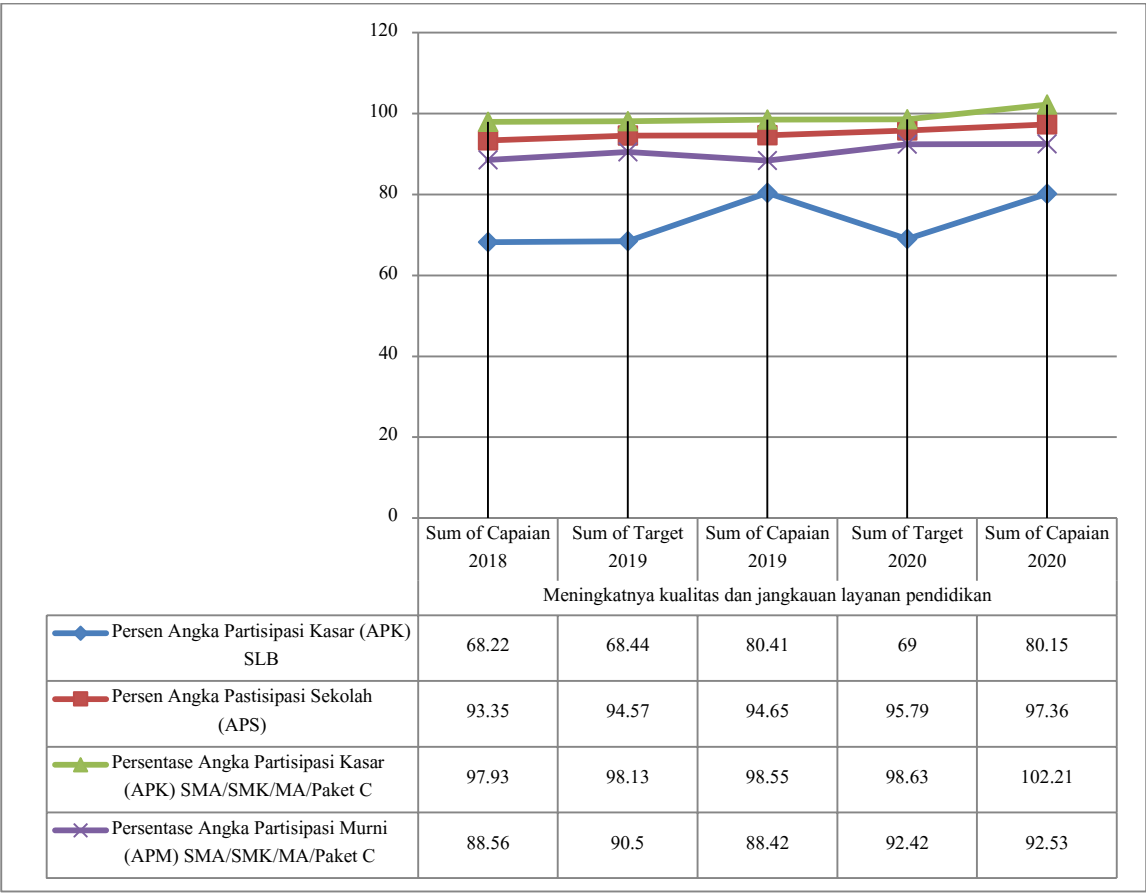
Gambar 3.1.1. Grafik Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) NTB Tahun 2020

Pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dari grafik di atas; tahun 2018 tercapai 13,51 persen, tahun 2019 di targetkan 13,57 ternyata tidak tercapai yaitu hanya 13,48 terpaut sekitar 0,09 persen dari target. Tahun 2020 target naik yaitu 13,62 dan berhasil melampaui target yaitu

13,70 pada tahun 2020. Pencapaian Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) dari grafik di atas; tahun 2018 tercapai 6,93 persen, tahun 2019 di targetkan 6,96 tercapai 7,27 dan melampaui target 0,31. Tahun 2020 target naik menjadi 6,98 dan berhasil tercapai yaitu 7,31 dan melampaui target sekitar 0,33 persen.

Selanjutnya, Indikator yang dapat menggambarkan Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan meliputi;

- i. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
- ii. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
- iii. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS)
- iv. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
- v. Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah
- vi. Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,
- vii. Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,



Gambar 3.1.2. Grafik Capaian Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan

Pencapaian Angka Partisipasi menunjukkan gerakan angka pencapaian yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Contoh, APK SLB capaian tahun 2018 68,22 target dinaikkan tahun 2019 68,44 tercapai 80,41 tahun 2020 ditarget 69 dan tercapai 80,15. Demikian seterusnya dan dapat diperhatikan pada grafik di atas.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

3.2.1. Capaian Indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2021 Bidang Pendidikan

KINERJA / KONDISI /SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	KETERANGAN
Misi ke 3; “NTB SEHAT DAN CERDAS” : Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	62.39	XX	Indeks pendidikan dibentuk dari indikator Capaian :
			XX	Nilai Ujian Nasional. UN Terhapus berdasarkan Surat Edaran Mendikbud No. 1/2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
			96.65	Angka Partisipasi Murni
			XX	Peta Mutu Pendidikan. Penilaian dilaksanakan oleh UTP Pusat yaitu LPMP NTB
		1 : 32	1 : 0.92	Rasio Ruang Kelas : 1. Setiap tahun terlaksana Penambahan Ruang dan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan DAK dan APBD (Aspirasi DPRD) 2. Penetapan alokasi DAK Fisik berdasarkan DAPODIK 3. Sasaran rasio ketersediaan Ruang Kelas mencakup Sekolah Menengah Negeri, Suasta, termasuk Madrasah Aliah
		13.68 Th	13.90 Th	Rata-Rata Lama Sekolah

3.2.2. Capaian Indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2021 Bidang Kebudayaan

KINERJA / KONDISI /SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	KETERANGAN
Misi 6; “NTB AMAN DAN BERKAH” : Terwujudnya	Indeks Kriminal	14,85	XX	1. Indeks Kriminal diinginkan menurun dengan kegiatan kebudayaan.

KINERJA / KONDISI /SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	KETERANGAN
Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)				2. Kemendikbud telah meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
				3. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

3.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan kondisi *Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing* dengan indikator; 1) **Harapan Lama Sekolah (HLS)** ditargetkan tahun 2021 sebesar 13,68 Tahun, dimana HLS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Minimum 0 dan maksimum 18 tahun, 2) **Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)** yang ditargetkan rata – rata sebesar 7,01 tahun, dimana RLS adalah rata-rata lama sekolah di suatu wilayah, x_i adalah lama sekolah penduduk ke- i di suatu wilayah dan n jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), ($i=1, 2, 3, \dots, n$). Selanjutnya, untuk mewujudkan kondisi Meningkatkan Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan indikator **Persentase penurunan konflik sosial** yang ditargetkan tahun 2021 sebesar 16,67%. Dalam pencapaian kondisi ini, Dikbud NTB hanya dapat menyumbang nilai yang berasal dari indikator Cagar Budaya yang direvitalisasi dengan target tahun 2021 sebesar 60,17%. Seiring berjalannya waktu, telah dilauncing Indeks Pembangunan Kebudayaan maka perlu penyesuaian dengan IPK, yang

paling relevan yaitu dimensi “Warisan Budaya” karena sesuai dengan struktur Permendagri 90 Tahun 2019 yang terkait dengan Program Pengembangan Kebudayaan.

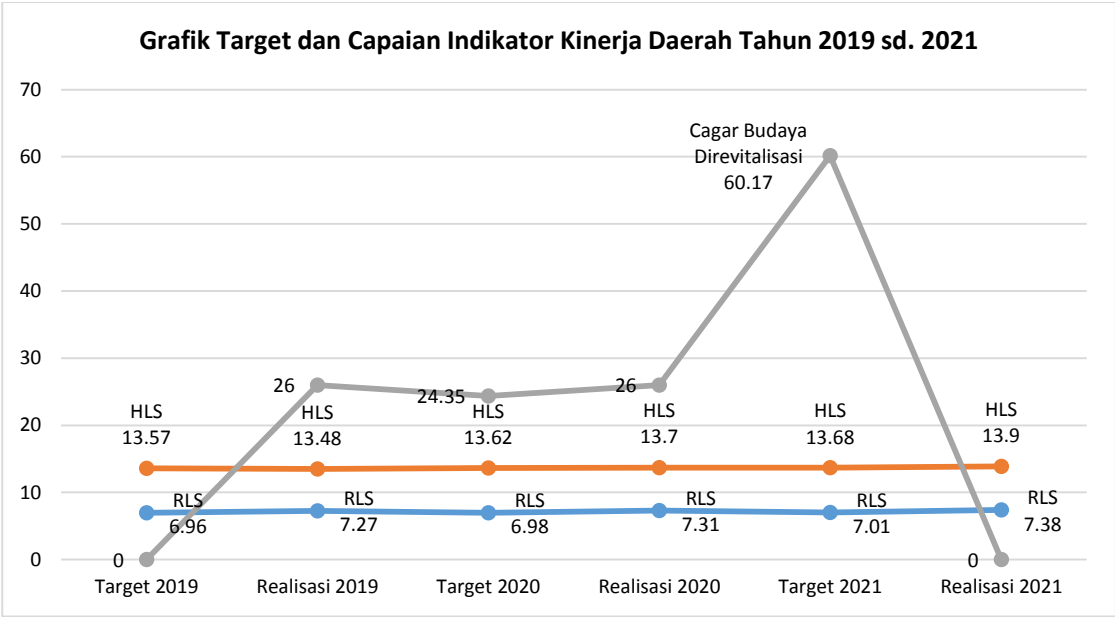
Tabel 3.3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021

KINERJA / KONDISI /SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS).	13,68 Th.	13.90 Th
	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS).	7,01 Th.	7.38 Th.

3.4. Capaian Sasaran Bidang Pendidikan dan Kebudayaan NTB Tahun 2021

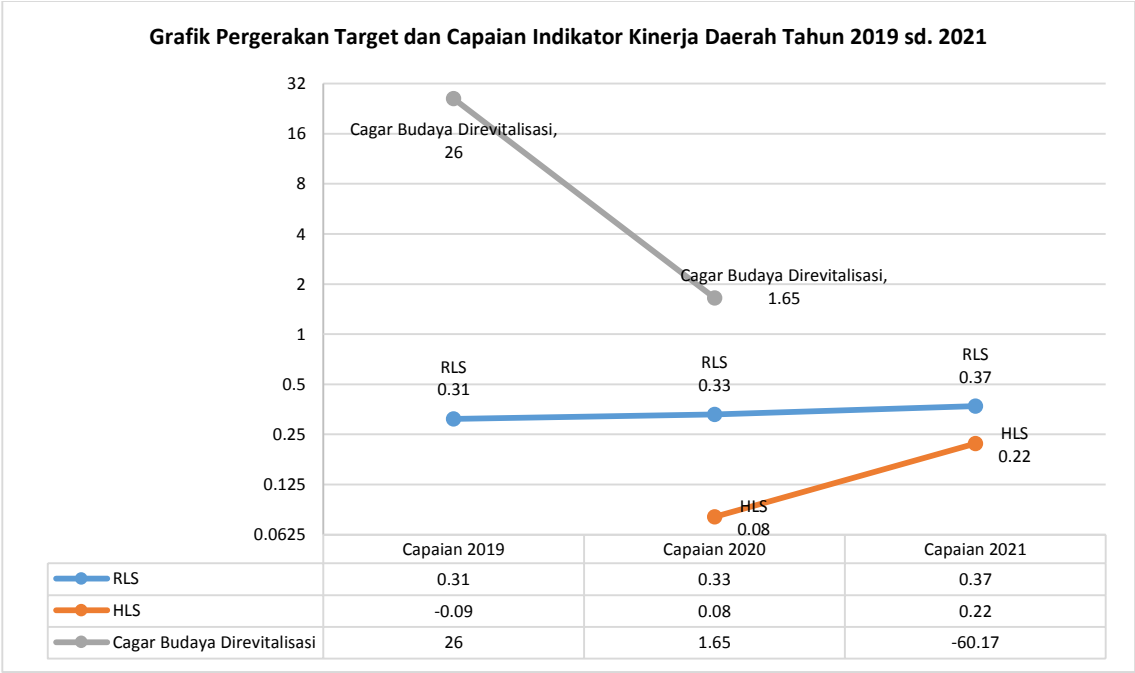
Tabel 3.4.1. Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Dikbud NTB Tahun 2021

Sasaran (Indikator Kinerja Daerah)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
RLS	6.96	7.27	6.98	7.31	7.01	7.38
HLS	13.57	13.48	13.62	13.7	13.68	13.9
Cagar Budaya Direvitalisasi	0	26	24.35	2.6	60.17	0



Gambar 3.4.1. Grafik Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 sd. 2021

Sesuai tabel dan grafik di atas, Dikbud NTB dapat menyumbangkan pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah, dan Cagar Budaya yang direvitalisasi dengan pergerakan trend pada setiap tahunnya meningkat sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.4.2. Grafik Pergerakan Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 sd. 2021

Capaian Harapan Lama Sekolah setiap tahunnya meningkat yaitu tahun 2019 meningkat 0,31 point, tahun 2020 meningkat 0,33 point, dan tahun 2021 meningkat 0.37 point. Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2019 turun sebesar 0.09 point, tahun 2020 naik sebesar 0.08 point, dan tahun 2021 naik sebesar 0.22 point. Sedangkan, untuk bidang kebudayaan indikator capaian tahun 2019 mencapai 26%, tahun 2020 meningkat sebesar 1.65%, dan tahun 2021 turun karena belum ada nilai dari perhitungan.

3.5. Capaian Kinerja Dikbud NTB Bidang Pendidikan Tahun 2021

Sebagaimana struktur Permendagri No. 90 Tahun 2019, berikut ini dipaparkan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2021

Tabel 3.5.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	PENDIDIKAN				
1	Indeks Pendidikan (Point)	62,03	62,42		
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,70	13,68	13,90
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98	7,31	7,01	7,38
4	Persentase APK SMA/MA/SMK/Paket C	98,63	102,21	99,15	106,41
5	Persentase APM SMA/MA/SMK/Paket C	92.42	92.53	93,40	96,65
6	Persentase APS SMA/MA/SMK/Paket C	95.79	95.79	96,68	98,08

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	PENDIDIKAN				
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas / Rombongan Belajar	1:02	1:30	1:1	1:0,92
8	Persentase APK PK-PLK	69	81,71	69,40	84,19
9	Rasio Guru Terhadap murid pendidikan Menengah (SMA, SMK)	1:20	1:20	1 : 18	1 : 11
10	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk SLB	1:15	1:7	1 : 8	1:5

Sumber: Dinas Dikbud, Provinsi NTB, BPS NTB, 2021

Tabel 3.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	%	93,4	96,65
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69,4	84,19
	Rasio ketersediaan ruang kelas / rombel	Rasio	1:01	1:0,92
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	1:18	1:11
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Rasio	1:08	1:05
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	%	60	24
	Penurunan Angka DO SMA	%	0,30	0,92
	Persentase SMA yang direvitalisasi		25	7,27
Sub Kegiatan :				
Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Ruang	75	75
Rehabilitasi ruang laboratorium kimia	Jumlah ruang laboratorium kimia yang direhab	Ruang	5	5
Rehabilitasi ruang laboratorium fisika	Jumlah ruang laboratorium fisika yang direhab	Ruang	3	3
Rehabilitasi ruang laboratorium biologi	Jumlah ruang laboratorium biologi yang direhab	Ruang	3	3
Rehabilitasi ruang perpustakaan	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	Ruang	3	3
Rehabilitasi ruang laboratorium komputer	Jumlah ruang laboratorium komputer yang direhab	Ruang	1	1
Rehabilitasi ruang guru	Jumlah ruang guru yang direhab	Ruang	2	2
Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya	Jumlah toilet (jamban) beserta sanitasinya yang direhab	Ruang	22	22
Rehabilitasi Ruang Tata Usaha	Jumlah Ruang Tata Usaha yang direhab	Ruang	2	2
Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Sekolah/Pimpinan	Jumlah ruang Kepala Sekolah/Pimpinan yang direhab	Ruang	2	2

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya yang memadai	Ruang	3	3
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium Kimia beserta perabotnya yang memadai	Ruang	10	10
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium Fisika beserta perabotnya yang memadai	Ruang	9	9
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium Biologi beserta perabotnya yang memadai	Ruang	6	6
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan inklusif beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Pusat Sumber Pendidikan inklusif beserta perabotnya yang memadai	Ruang	1	1
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta perabotnya yang memadai	Ruang	2	2
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya yang memadai	Ruang	10	10
Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya yang memadai	Ruang	4	4
Pembangunan Ruang Guru beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Guru beserta perabotnya yang memadai	Ruang	3	3
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	Terbangunnya toilet (jamban) beserta sanitasinya	Ruang	25	25
Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Tata Usaha beserta perabotnya yang memadai	Paket	1	1
Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya yang memadai	Ruang	2	2
Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya	Terbangunnya Ruang UKS beserta perabotnya yang memadai	Ruang	8	8
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubler Sekolah yang di adakan	Paket	1	1
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Pendidikan IPA yang diadakan	Paket	1	1
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang diadakan	Paket	1	1
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Media Pendidikan yang diadakan	Paket	1	1
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah peserta didik SMA yang menerima SPM Pendidikan (Alat tulis)	Orang	15,000	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima BOS	Orang	104,771	104,771
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,92
	Persentase SMK yang direvitalisasi	%	25	30,27

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD		10	0
	Persentase SMK memperoleh akreditasi minimal B	%	70,68	61,52
Sub Kegiatan:				
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Ruang	10	10
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang dibangun	Ruang	30	30
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Sekolah) yang di rehab	Ruang	5	5
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meublair Sekolah yang di adakan	Ruang	29	29
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK		8,125	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	59	59
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah paket alat yang diadakan	Paket	25	33
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan PBM, ujian SMK	Dok	30	30
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa penerima BOS	Orang	78,102	78,102
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan PBM, ujian SMK	Dokumen	2	2
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	%	10	5,81
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	%	32	42
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	%	30	30
Sub Kegiatan				
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang dibangun	Ruang	2	3,5
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah yang dibangun	Ruang	3	4,5
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet (jamban) beserta sanitasinya yang dibangun	Ruang	2	4
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	Ruang	1	2
Rehab Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang di rehab	Ruang	16	36
Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Ruang	3	3
Rehab Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah selasar penghubung dan toilet yang di rehab	Ruang	14	16
Rehab Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Keterampilan yang direhab	Ruang	3	3

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Rehab Ruang Bina Diri untuk Tuna Grahita ©	Jumlah Ruang Bina Diri untuk tunagrahita © yang direhab	Ruang	1	2
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan meubler dan perabot lainnya	Paket	6	6
Pengadaan Alat Praga dan Praktik Peserta Didik	Jumlah pengadaan media pendidikan dan peralatan pendidikan	Paket	14	14
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti lomba LKSN, FLS2N dan KOSN	Orang	290	290
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah siswa penerima BOS	Orang	4,003	4,003
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen yang disusun	Dok	2	2
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100
Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Menengah	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	%	20	9,09
Sub Kegiatan :				
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Bimtek Kurikulum SMA	Orang	150	30
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah SMA yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	%	100	56,66
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	%	100	50,15
	Persentase Pengawas SMA bersertifikat Calon Pengawas (Cawas)	%	100	100
	Persentase Guru SMA yang berijazah minimal SI/ DIV dan bersertifikat pendidik	%	100	98,74
	Persentase Pendidik SMK minimal DIV/SI dan bersertifikat pendidik	%	100	28,57
	Persentase Guru SLB yang berijazah minimal SI/ DIV	%	100	90,87
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio guru terhadap peserta didik SMA	Rasio	1:18	1:15
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	Rasio	1:18	1:11
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	Rasio	1:05	1:05
Sub Kegiatan				
	Jumlah PAK Jabatan Fungsional yang dinilai		35	3
	Jumlah peserta Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) Jenjang SMA, SMK, dan SLB	Orang	6,500	3,715
	Jumlah JJM	JTM	134,626	134,626
	Jumlah Guru Tetap Yayasan (GTY)	JTM	23,675	23,675
	Jumlah TU yang terbayar	OB	3,147	3,147

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Jumlah Sistem Pendataan dan Pemetaan PTK Jenjang SMA, SMK, dan SLB yang dikembangkan	Dokumen	9	3
	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMA, SMK, dan SLB	Orang	680	90
	Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PTK dan Tenaga Kebudayaan	dokumen	9	3
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	%	100	33,33
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	%	100	33,33
Sub Kegiatan :				
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Naskah Buku Bacaan, Modul dan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Daerah yang tersusun	%	100	37,5
UPT BTIDP				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	%	93,4	96,65
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69,4	84,19
	Rasio ketersediaan ruang kelas / rombel	Rasio	1:01	1:0,92
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	1:18	1:11
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Rasio	1:08	1:05
Pengelolaan Pendidikan SMA	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	%	60	24
	Penurunan Angka DO SMA	%	0,30	0,92
Sub Kegiatan :				
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Media Pembelajaran	Judul /Media	10	5
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta minat, bakat dan kreativitas siswa	Orang	400	289
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah peserta pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	8,737	393
Pengelolaan Data Pendidikan	Persentase Data Pendidikan yang dipublikasi	Dokumen	1	1
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Persentase SMK yang direvitalisasi	%	25	30,27
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD		10	0
	Persentase SMK memperoleh akreditasi minimal B	%	70,68	61,52
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Media Pembelajaran	Judul /Media	10	6
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta minat, bakat dan kreativitas siswa	Orang	400	51
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah peserta pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	7,005	330
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	%	10	5,81
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	%	32	42
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	%	30	30
Sub Kegiatan				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	28	28
CABANG DINAS MATARAM - LOMBOK BARAT				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	%	93,4	96,65
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69,4	84,19
	Rasio ketersediaan ruang kelas / rombel	Rasio	1:01	1:0,92
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	1:18	1:11
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Rasio	1:08	1:05
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	%	60	24
	Penurunan Angka DO SMA	%	0,30	0,92
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA yang dimonev	Sekolah	61	61
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	60	83

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
	Persentase SMK yang direvitalisasi	%	25	30,27
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD		10	0
	Persentase SMK memperoleh akreditasi minimal B	%	70,68	61,52
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMK yang dimonev	Sekolah	63	63
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	62	62
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	%	10	5,81
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	%	32	42
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	%	30	30
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SLB yang dimonev	Sekolah	6	6
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	12	12
CABANG DINAS LOMBOK TENGAH				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	%	93,4	96,65
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69,4	84,19
	Rasio ketersediaan ruang kelas / rombel	Rasio	1:01	1:0,92
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	1:18	1:11
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	Rasio	1:08	1:05
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	%	60	24
	Penurunan Angka DO SMA	%	0,30	0,92
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA yang dimonev	Sekolah	58	58

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	35	35
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
	Persentase SMK yang direvitalisasi	%	25	30,27
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD		10	0
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMK yang dimonev	Sekolah	69	69
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	16	16
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SLB yang dimonev	Sekolah	5	5
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	3	3
CABANG DINAS LOMBOK TIMUR				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA yang dimonev	Sekolah	66	66
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMK yang dimonev	Sekolah	93	93
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	150	150
CABANG DINAS KLU				

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA yang dimonev	Sekolah	15	15
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	26	26
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMK yang dimonev	Sekolah	13	13
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	37	37
CABANG DINAS SUMBAWA BARAT				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA yang dimonev	Sekolah	9	9
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	75	75
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMK yang dimonev	Sekolah	6	6
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	35	35
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SLB yang dimonev	Sekolah	1	1
CABANG DINAS SUMBAWA				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA yang dimonev	Sekolah	28	28
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah PAK yang dinilai	PAK	80	80
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Laporan hasil pembinaan	Dokumen	28	28
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMK yang dimonev	Sekolah	19	19
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan hasil pembinaan	Dokumen	19	19
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SLB yang dimonev	Sekolah	2	2
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan hasil pembinaan	Dokumen	2	2
CABANG DINAS DOMPU				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	%	99,15	106,41
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
Sub Kegiatan :				
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Di Monev	Sekolah	18	18
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK Yang di terbitkan	PAK	60	60

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Sub Kegiatan :				
Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Di Monev	Sekolah	9	9
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah PAK Yang di terbitkan	PAK	40	40
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Yang Di Monev	Sekolah	9	9
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah PAK Yang di terbitkan	PAK	40	40
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Di Monev	Sekolah	1	1
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Khusus	Jumlah PAK Yang di terbitkan	PAK	10	10
CABANG DINAS BIMA				
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	%	76,2	77,27
Sub Kegiatan :				
Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah SMA Yang Di Monev	Sekolah	68	68
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah PAK Yang di terbitkan	PAK	303	303
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penurunan Angka DO SMK	%	0,65	1,91
Sub Kegiatan :				
Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan	Jumlah SMK Yang Di Monev	Sekolah	41	41

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Pendidikan Menengah Kejuruan				
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase APK SLB	%	69,4	84,19
Penyiaapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah SLB Yang Di Monev	Sekolah	19	19

3.6. Capaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2021 Bidang Kebudayaan

Tabel 3.6.1. Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2021 (Setelah Revisi RPJMD dan Renstra)

Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	100	70
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Kab / Kota	10	10
Sub Kegiatan				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah sekolah yang dibina permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional	Sekolah	300	300
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta musyawarah kebudayaan	Orang	25	25
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah pemenang Lomba Dokumentasi Visual Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Kuliner Tradisional	Orang	1	1
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah kelompok /banjar yang diberikan hibah uang	Banjar	2	2
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat penerima sarpras	Lembaga	8	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	100	100
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya	Persentase sekolah yang	%	10	10

Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Jumlah peserta workshop kesenian tradisional	Orang	54	54
	jenis seni yang ditampilkan pada festival Kesenian Daerah	Jenis	6	6
	jenis seni yang ditampilkan pada festival Seni pertunjukan	Jenis	6	6
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	%	100 % / 10 Kab Kota	100 % / 10 Kab Kota
PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan	%	25	34,04
Sub Kegiatan :				
Pemberdayaan SDM dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Juara Lomba Dokumentasi Visual Sejarah pengobatan Tradisional	Orang	1	1
Penyediaan sarana dan prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah peserta Pembinaan sejarah di sekolah	Orang	300	300
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kab / Kota	10	10
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	%	100	20
Sub Kegiatan				
Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang direhabilitasi	CB	10	2
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah dokumen/digitalisasi Pengembangan Cagar Budaya	Dok	1	1
Pembinaan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase Pembinaan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	%	25	0
UPT TAMAN BUDAYA				
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan	%	100	100
Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
Sub Kegiatan :				
Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah pertunjukan olah seni dan eksperimentasi seni tradisi	Keg	3	3
Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya lintas	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	%	100	100

Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi				
Sub Kegiatan :				
Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya	Jumlah pargelaran tetap dan pameran tetap	Keg	17	17
MUSEUM NEGERI				
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan kunjungan Museum	%	33,33	72,29
Pengelolaan museum provinsi	Persentase Koleksi museum yang dikelola	%	25,98	47,63
Sub Kegiatan :				
Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah warisan budaya (koleksi museum) yang dirawat dan dikaji	Koleksi	2000	3.667
Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Jumlah SDM yang dilatih	Orang	42	37
Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Jumlah program publik yang menerapkan literasi	Prog	12	12
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Persentase sarana dan prasarana pelayanan pengunjung yang ditingkatkan kualitasnya	%	90	90
Revitalisasi sarana dan prasarana museum	Jumlah sarpras museum yang direvitalisasi	Unit	9	9

3.7. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja dan Solusi

Selama tahun 2020 pelaksanaan kegiatan pada Dinas Provinsi NTB sampai kepada kantor cabang dan pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah seluruh NTB tetap berlangsung tanpa mengabaikan protokol penanganan Covid 19. Hampir sepanjang tahun tanpa bekerja dari rumah atau work from home karena tidak mungkin untuk dilakukan dan harus bekerja ekstra waktu tambahan. Syukur Alhamdulillah, walaupun ada karyawan terpapar, namun dengan penerapan sistem isolasi dan jaga jarak, bekerja ekstra tetap berlangsung. Demikian juga dengan tatap muka di Sekolah seluruh NTB, walaupun tidak diperkenankan, tetapi proses belajar harus tetap berlangsung baik secara daring, tatap muka dengan pembatasan kapasitas dan waktu. Para guru harus merubah tatanan belajar tidak terpaku kepada belajar tatap muka.

Koordinasi dan kerjasama antara semua komponen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB sangat intensive dilakukan. Penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, volume dan frekuensi kegiatan yang sangat tinggi menuntut kecepatan dan ketepatan dalam bertugas sehingga apabila terdapat kendala segera teridentifikasi dan teratasi. Selain koordinasi internal, koordinasi atara atau dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya tetap dilakukan dengan intensive. Terutama dalam kegiatan perencanaan, pencairan anggaran, pelaporan, penyediaan atau penggunaan barang dan jasa. Peran teknologi komunikasi, peran aplikasi Sistem Informasi dan Managemen Keuangan dan Anggaran dan model – model interaksi online jarak jauh sangat membantu pelaksanaan tugas.

Faktor pendukung lainnya, disatu sisi keterbatasan anggaran daerah akan tetapi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terdapat sumber anggaran lain yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Seperti 1) Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan, rehab, dan sarana prasarana sekolah, 2) DAK Non Fisik untuk Museum, Taman Budaya, dan BOS Sekolah dengan jumlah yang pantastis. Faktor penghambat secara singkat dapat digambarkan bahwa kegiatan tidak dapat dieksekusi yaitu karena revisi anggaran berkali – kali sehingga menyebabkan durasi waktu yang tersedia sangat pendek, karena kesalahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kekurangan tenaga yang produktif, ketersediaan anggaran Daerah dan lainnya seperti karena pertimbangan Covid 19.

Sedangkan pada tahun 2021, beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana matrik berikut ini.

Tabel 3.7.1. Permasalahan Dalam Pencapaian Kinerja Dikbud NTB Tahun 2021

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/MA/SMK/Paket C	
	APM SMA/MA/SMK/ Paket C	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Keterbatasan Anggaran, Sebaran Penduduk, Jumlah Ruang Kelas SLB tidak baku karena harus sesuai ketunaan ABK, Sebagian ruang kelas adalah kelas Madrasah, dan sebagainya seperti Belum tergambar kondisi fisik Ruang Kelas secara keseluruhan sehingga patokan utama adalah DAPODIK

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Akreditasi SMA Minimal B	
	Angka melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggi	Belum semua sekolah swasta mengirimkan data siswa melanjutkan, adanya pandemi menyebabkan banyak siswa tidak mampu untuk melanjutkan
	Penurunan Angka DO SMA	
	Persentase SMA yang direvitalisasi	Target tidak dapat dicapai karena untuk tahun 2021 dikonsentrasikan kepada penyediaan fasilitas secara maksimal pada masing-masing sekolah (konsep ketuntasan) bukan hanya ketersebaran semata
	Persentase Data Sarpras SMA yang tersedia	
	Persentase peserta didik yang menerima Layanan SPM bidang Pendidikan	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan telah mengusulkan pengajuan dana ke BPKAD namun dana yang tersedia hanya 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Persentase Pelaporan penggunaan dana BOS	Tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOSnya ke Dinas karena saat ini pencairan Dana BOS langsung dari pusat dan pelaporan langsung dikirim ke pusat
	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMA	
	Persentase pembinaan prestasi siswa	
	Persentase Data Peserta Didik SMA yang tersedia	
	Persentase Akreditasi SMA minimal B	Berdasarkan Lap. Hasil akreditasi BAN SM
	Persentase Usulan pengajuan Izin	Target tidak mencapai 100% karena adanya regulasi baru terkait

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Operasional yang disetujui	perizinan sekolah dimana dinas tidak diperbolehkan lagi menerbitkan izin sekolah dan penerbitan izin harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase SMA yang menerapkan SKS	
	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan
	Persentase Dokumen Kurikulum yang disyahkan	
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMA	Persentase akreditasi SMA Minimal B	
	Penurunan DO SMA	
	Persentase Angka Melanjutkan ke PT	Belum semua sekolah swasta mengirimkan data siswa melanjutkan, adanya pandemi menyebabkan banyak siswa tidak mampu untuk melanjutkan
	Persentase SMA yang direvitalisasi sarprasnya	target tidak dapat dicapai karena untuk tahun 2021 dokonsentrasikan kepada penyediaan fasilitas secara maksimal pada masing-masing sekolah (konsep ketuntasan) bukan hanya ketersebaran semata
	Jumlah peserta didik SMA yang menerima SPM Pendidikan (Alat tulis)	Dinas sudah menyiapkan data base peserta didik penerima SPM dan menyiapkan dokumen pelelangan dan telah mengusulkan pengajuan dana ke BPKAD namun dana yang tersedia hanya 50% dan saat akan dieksekusi waktu terbatas karena harus dilakukan tender
	Jumlah Siswa Penerima BOS	
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMK	Penurunan Angka DO SMK	
	Persentase SMK yang direvitalisasi	
	Persentase SMK Negeri sebagai BLUD	Usulan telah disampaikan kepada Tim Penilai yang terdiri dari Sekda,

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
		Karo Ekonomi, Karo Hukum, inspektorat, Bappeda dan BPKAD namun hingga saat ini hasil penilaian belum keluar
	Persentase SMK memperoleh akreditasi minimal B	
	Persentase Data Sarpras yang tersedia	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data penerima terlambat diterima, dan anggaran yang tersedia hanya setengah sehingga tidak dieksekusi
	Jumlah Siswa penerima BOS	
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase APK SLB	
	Persentase Sekolah yang menerapkan Layanan Inklusi	
	Persentase Akreditasi SLB Minimal B	
	Persentase SLB yang direvitalisasi sarprasnya	
	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) Siswa SMK	Data terlambat diterima, anggaran yang tersedia hanya setengahnya
	Jumlah siswa penerima BOS	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Menengah	Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah	Kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena dana yang dialokasikan mengalami pengurangan (refocusing) sehingga target peserta yang akan diundang berubah atau mengalami penurunan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase Kurikulum disahkan	Anggaran direfocusing
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah SMA yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	
	Persentase Pengawas SMA bersertifikat Calon Pengawas (Cawas)	
	Persentase Guru SMA yang berijazah minimal SI/ DIV	
	Persentase Pendidik SMK minimal DIV/SI dan bersertifikat pendidik	
	Persentase Guru SLB yang berijazah minimal SI/ DIV	
	Persentase Kepala Sekolah SMK yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah (Cakep)	
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio guru terhadap peserta didik SMA	
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	
	Rasio Guru Terhadap Peserta Didik SMK	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah peserta Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB	
	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMA, SMK, dan SLB	
	Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PTK dan Tenaga Kebudayaan	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah Swasta yang terpantau perizinannya	Anggaran Direfocusing

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Izin yang diterbitkan	Anggaran Direfocusing
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan sastra	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase Naskah Buku Bacaan, Modul dan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Daerah yang tersusun	Akibat Refokusing anggaran berdampak pada perolehan Juara yang seharusnya 6 orang menjadi 4 orang sehingga penghargaan pemerintah pada masyarakat tidak memenuhi target.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan di Sekolah Negeri	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
	Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas	

Urusan Program / Kegiatan /Sub kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3
	Sejarah di Satuan Pendidikan	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	

3.8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi anggaran pada tahun 2020 sangat sering dilakukan, pelaksanaan efisiensi tetap mengacu kepada ketentuan atau anjuran OPD terkait dan lembar kerja. Anggaran kegiatan yang paling sering terkena rasionalisasi atau pemangkasan seperti kegiatan – kegiatan Pelatihan yang harus mengumpulkan banyak orang, perjalanan Dinas yang tidak mungkin dilaksanakan. Walaupun demikian, koordinasi harus berjalan dan merubah pola; mengurangi volume, bahkan menghapus kegiatan, atau diganti dan dilaksanakan melalui media teknologi informasi. Sebagai dampak efisiensi tersebut realisasi anggaran tidak mungkin mencapai 100%. Adapun gambaran realiasi anggaran dapat dibaca pada tabel dan grafik realisasi anggaran.

3.9. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran seperti; Ketersediaan Dana Alokasi Khusus untuk menunjang pencapaian tujuan untuk *meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan*. Secara khusus sangat menunjang ketersediaan ruang kelas, dan sarana prasarana belajar bagi siswa sekolah. Demikian juga dengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah yang sangat mendukung operasional sekolah. Disamping itu, komitmen kepala pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dan program unggulan di bidang pendidikan sangat membantu pencapaian indikator kinerja seperti halnya dengan revitalisasi SMK. Dimana program ini secara utuh menjadi satu dengan Program Pengelolaan Pendidikan Bidang SMK.

Secara umum penyebab kegagalan pencapaian kinerja karena keterbatasan anggaran selain itu sering terkendala karena kurangnya management terhadap data. Harusnya, pengelolaan data bidang pendidikan menjadi isu penting sehingga pencapaian kinerja dapat terukur secara empirik yang bukan berdasarkan kepada laporan realisasi fisik dan keuangan saja. Selain itu, masih

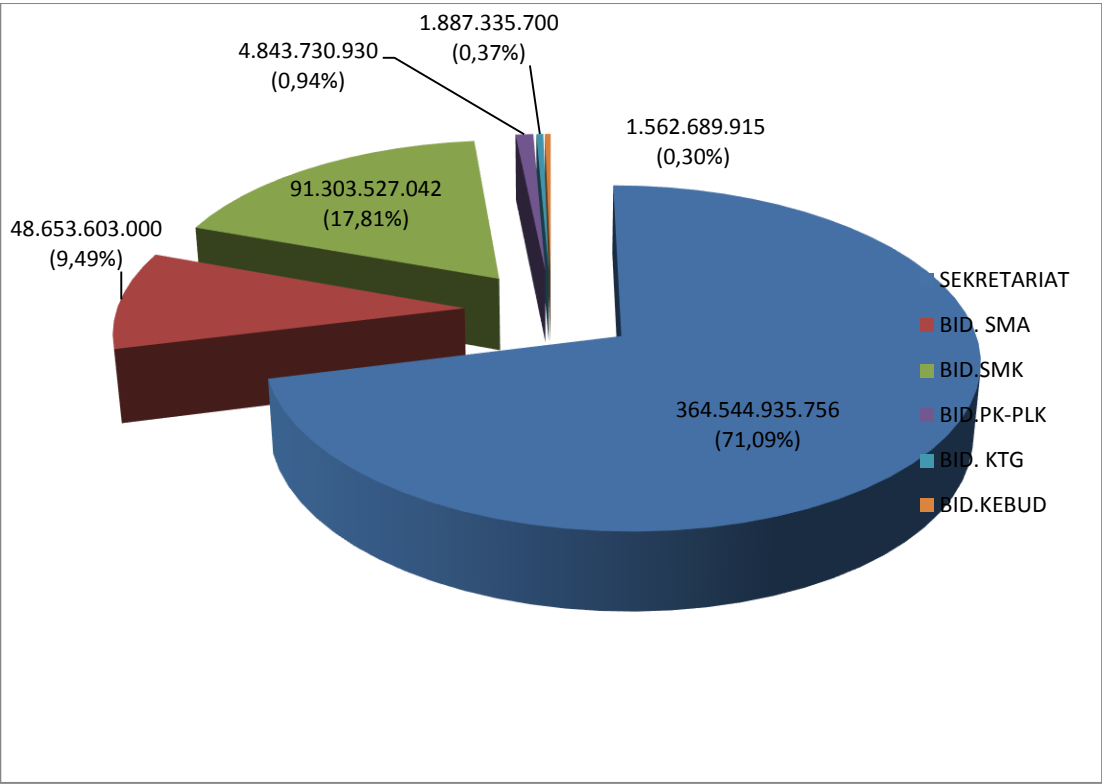
banyak kendala atau pengganggu seperti sering terjadi refocusing anggaran yang secara nyata dan langsung mengganggu ketercapaian indikator.

3.10. Realisasi Anggaran

Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2020 sebesar Rp. 1.2457.305.198.489,-. Pagu tersebut dibagi dalam Dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung Rp.730.766.213.736,- dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.526.538.984.753; yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai yang terdiri dari : gaji dan tunjangan Rp.759.043.754.752,- Belanja Barang dan Jasa Rp.276.025.201.027,- dan Belanja Modal Rp.172.451.053.051,-. Belanja Langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (induk) sebesar 512.795.822.343,- tersebar di 5 Bidang dan Satu Sekretariat, yaitu,

- 1. Sekretariat Sebesar Rp. 364.544.935.756;
- 2. Bidang SMA Sebesar Rp. 48.653.603.000;
- 3. Bidang SMK Sebesar Rp. 91.303.527.042;
- 4. Bidang PKLK sebesar Rp. 4.834.750.930;
- 5. Bidang Ketenagaan sebesar Rp. 1.887.335.700;
- 6. Bidang Kebudayaan Rp. 1.562.689.915;

Adapun grafik Belanja Langsung sesuai Bidang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.10.1. Grafik Distribusi Anggaran APBD Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2020

Dari jumlah Anggaran Balanja Langsung APBD I di atas, Sekretariat mengelola sebesar 71,094%, Bidang SMA sebesar 9,49 %, Bidang SMK sebesar 17,81 %, Bidang PKPLK sebesar 0,94 %, Bidang Ketenagaan sebesar 0,37 % dan Bidang Kebudayaan sebesar 0,30 %.

Total PAGU belanja pada APBD yang dikelola langsung oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2020, sebesar Rp. 1.257.305.198.489,- Realisasi pengeluaran sampai bulan Desember 2020 berjumlah Rp. 1.236.211.393.249,- sehingga daya serapan anggaran adalah 98,32% dan daya seraf Fisik 99,71 %.

$$\frac{\text{Rp.1.239.211.393.249,-}}{\text{Rp. 1.257.305.198.489,-}} \times 100\% = 98,32\%$$

3.10.1. Realisasi Anggaran Sekretariat

Tahun 2020 Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.364.544.935.756,- realisasi keuangan Rp.360.113.676.634; (98,78 %) dan daya serap Fisik 99.72 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 1,22 % sebesar Rp. 4.431.259.122; melalui 8 kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VIII RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16.

Tabel 3.10.1.1. Realisasi Anggaran Sekretariat DIKBUD NTB Tahun Anggaran 2020

NO. PROG.	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK %	
			(Rp)	%		
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.590.515.882	3.887.798.809	84,69	96,90%	702.717.073
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.177.100.000	919.474.195	78,11	94,20%	257.625.805
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.246.044.500	1.081.795.300	86,82	100,00%	164.249.200
5.2.06	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	421.603.500	365.082.000	86,59	100,00%	56.521.500
5.2.07	Program Peningkatan	274.205.350	239.100.513	87,20	100,00%	35.104.837

NO. PROG.	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK %	
			(Rp)	%		
5.2.22	Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	61.954.916.985	60.294.957.247	97,32	99,74%	1.659.959.738
5.2.27	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	786.439.600	499.831.000	63,56	97,77%	286.608.600
5.2.30	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	229.491.190.089	223.796.160.000	97,52	100,00%	5.695.030.089
	PROGRAM BOS	229.491.190.089	223.796.160.000	97,52	100,00%	5.695.030.089
		299.942.015.906	291.084.199.064	97,05	99,87	8.857.816.842

Tabel 3.10.2. Realisasi Fisik Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
2	3	4	5	6	7
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi dan Manajemen Pendidikan	Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi Tk. Provinsi (22.10)	Terseleksinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi Tk. Provinsi	105 Orang	105 Orang
		Kegiatan Minat Bakat dan Kreatifitas siswa (22.11)	Terseleksinya siswa berprestasi bidang Seni, Olah Raga, dan Sain	550 Orang	550 Orang
		Kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Semester Bersama (22.13)	Terselenggaranya ujian Akhir SD/MI, Paket A/ULA	3.981 Sekolah	3.981 Sekolah
		Kegiatan Penyediaan Beasiswa SI, S2 dan S3 (22.14)	Terbayarnya Bea Siswa SI, S2 dan S3	15 Orang	14 Orang
			Terlaksananya Diklat TOEFL dan IELT	600 Orang	600 Orang
			Terfasilitasinya Putra/Putri Daerah untuk melanjutkan sekolah ke LN	200 Orang	265 Orang
		Kegiatan Pengembangan Mutu Pendidikan (22.15)	Terbayarkannya Jasa Jam mengajar	6.852 Orang	6.852 Orang

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
2	3	4	5	6	7
		Kegiatan Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Tersalurkannya Dana BOS Tepat Sasaran	654.545 Orang	654.545 Orang
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi dan Manajemen Pendidikan	Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendidikan	Tersusunnya Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan yang valid	6 Dok	6 Dok
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev pemberian hibah dan bansos	350 Proposal	794 Proposal

3.10.2. Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun 2020 Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.48.653.603.000,- Realisasi keuangan Rp. 46.118.486.250.250; (94,79 %) dan daya serap Fisik 99,30% ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 5,21 % sebesar Rp. 2.535.116.750; melalui 12 kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VIII RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16. Seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.2.1. Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan SMA Tahun Anggaran 2020

NO. PRG	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK %	
			(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.01	Pembangunan gedung sekolah	1.900.000.000	1.831.417.000	96,39	100,00	68.583.000
5.2.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	19.705.800.000	19.517.507.000	99,04	100,00	188.293.000
5.2.16.04	Penambahan ruang guru sekolah	456.000.000	447.054.000	98,04	100,00	8.946.000
5.2.16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA,	12.287.410.000	12.287.410.000	100,00	100,00	0

NO. PRG	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK %	
			(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.16.09	IPS dan lain-lain)					
	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas paker	1.675.000.000	1.469.733.000	87,75	100,00	205.267.000
5.2.16.12	Pembangunan pepustakaan sekolah	523.000.000	476.621.000	91,13	100,00	46.379.000
5.2.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	22.158.336.000	20.962.234.220	94,60	96,35	1.196.101.780
5.2.16.19	Pengadaan meublair sekolah	250.000.000	247.750.000	99,10	100,00	2.250.000
5.2.16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	1.078.000.000	978.680.000	90,79	100,00	99.320.000
5.2.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1.719.512.405	1.681.450.000	97,79	100,00	38.062.405
5.2.16.69	Monitoring evaluasi dan pelaporan	44.576.575	7.931.000	17,79	18,00	36.645.575
5.2.16.70	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	1.479.298.000	1.353.882.202	91,52	98,08	125.415.798
		63.276.932.980	61.261.669.422	96,82	98,61	2.015.263.558

Tabel 3.10.3. Realisasi Fisik Bidang Pembinaan SMA Tahun 2020

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
				Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
3.	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (23.01)	Terbangunnya Gedung Sekolah	3 Paket	3 Paket
			Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (23.03)	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	95 Paket	95 Paket

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
				Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
			Kegiatan Penambahan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah (23.04)	Terbangunnya Ruang Guru Sekolah	2 Paket	2 Paket
			Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dll)	Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dll)	37 Unit	37 Unit
			Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasiitas parkir (23.09)	Terbangunnyataman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir	10 Paket	10 Paket
			Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah (23.12)	Terbangunnya Perpustakaan Sekolah	2 Paket	2 Paket
			Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan PeragaSiswa (23.18)	Tersedianya pengadaan Alat Praktek dan PeragaSiswa	3 Paket	3 Paket
			Kegiatan Pengadaan meubelair sekolah (23.19)	Tersedianya meubelair sekolah	1 Paket	1 Paket
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah (23.20)	Tersedianya perlengkapan sekolah	1 Paket	1 Paket
			Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (23.41)	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	6 Paket	6 Paket
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (23.69)	Terlaksananya monitoring dan evaluasi sekolah	318 Sekolah	318 Sekolah
			Kegiatan Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa (23.70)	Terseleksinya siswa berprestasi bidang OSN, O2SN, FLS2N, Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Cerdas Cermat 4 Pilar	700 Orang	693 Orang
			Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat tingkat pendidikan menengah atas (SMA) (23.77)	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat jenjang SMA	5 Sekolah	5 Sekolah

3.10.3. Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan Pendidikan SMK

Tahun 2020 Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Nusa Tenggara Barat Mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar

Rp.91.303.527.042,-realisasi keuangan Rp.84.115.831.111; (92,13 %) dan daya serap Fisik 98,61 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 7,87 % sebesar Rp. 7.187.691.931; melalui 10 kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VII RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16 Seperti Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.10.4. Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan SMK Tahun Anggaran 2020

NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		FISIK %	
1	2	3		4	5
Penambahan ruang kelas sekolah	3.141.000.000	3.141.000.000	100,00	100,00	0
Penambahan ruang guru kepala sekolah	232.000.000	231.720.000	99,88	100,00	280.000
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	24.160.000.000	22.860.000.000	94,62	95,65	1.300.000.000
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	49.901.470.000	47.148.503.454	94,48	95,56	2.752.966.546
Pengadaan meublair sekolah	351.640.000	347.955.000	98,95	100,00	3.685.000
Pengadaan perlengkapan sekolah	100.000.000	99.937.200	99,94	100,00	62.800
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1.574.300.000	1.014.927.000	64,47	100,00	559.373.000
Workshop Penyusunan/Pengembangan kurikulum	342.270.500	224.258.200	65,52	87,30	118.012.300
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	170.000.000	169.540.400	99,73	100,00	459.600
Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	1.003.361.100	912.150.100	90,91	99,50	91.211.000
	80.976.041.600	76.149.991.354	94,04	95,90	4.826.050.246

Tabel 3.10.5. Realisasi Fisik Bidang Pengelolaan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2020

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (24.01)	Terbangunnya Gedung Sekolah	1 Paket	0
		Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (24.03)	Tersedianya ruang kelas sekolah	15 Paket	15 Paket
		Kegiatan Penambahan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah (24.04)	Tersedianyaruang guru	1 Paket	1 Paket

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain) / (24.05)	Tersedianya ruang Lab dan ruang Praktikum Sekolah	41 Ruang	40 Ruang
		Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (24.14)	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	44 Ruang	0
		Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa (24.18)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	99 Paket	99 Paket
		Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah (24.19)	Tersedianya meubelair sekolah	2 Paket	2 Paket
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah (24.20)	Tersedianya perlengkapan sekolah	1 Paket	1 Paket
		Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah (24.41)	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung sekolah	4 Paket	4 Paket
		Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah (24.44)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	1 Paket	0
		Kegiatan Workshop Penyusunan / Pengembangan Kurikulum (24.57)	Terlaksananya workshop kurikulum bidang kompetensi keahlian pertanian, kelautan, pariwisata, senikreatif dan teknologi rekayasa	5 Kompetensi	5 Kompetensi
		Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (24.66)	Tersedianya siswa SMK yang bersertifikat kompetensi	60 Orang	60 Orang
		Kegiatan Peningkatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (24.70)	Terlaksananya Lomba O2SN, FLS2N, dan LKS jenjang SMK	320 Orang	153 Orang
		Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya kegiatan Penataan kelembagaan SMK	1 Dok	1 Dok
		Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Terlaksananya pembinaan sekolah sehat jenjang SMK	5 Sekolah	5 Sekolah

3.10.4. Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan PK-PLK

Tahun 2020 Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.4.834.730.930,- realisasi keuangan Rp.4.493.463.811; (92,77 %) dan daya serap Fisik 99,59 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 7,23 % sebesar Rp. 350.267.122,- melalui 11 kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB IX RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16 Seperti Tabel dibawah ini.

Tabel 3.10.5. Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan PKPLK Tahun Anggaran 2020

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK %	
5.2.17.01	Pembangunan Gedung Sekolah	68.000.000	49.643.000	73,00	100,00	18.357.000
5.2.19.03	Penambahan ruang kelas sekolah	3.269.712.000	3.260.207.000	99,71	100,00	9.505.000
5.2.19.17	Pengadaan alat praktek dan peraga siswah	311.400.000	277.536.800	89,13	95,00	33.863.200
5.2.19.19	Pengadaan mebeluer sekolah	200.000.000	0	0,00	0,00	200.000.000
5.2.19.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4.540.490.000	2.926.323.000	64,45	94,00	1.614.167.000
5.2.19.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	601.532.000	576.216.000	95,79	100,00	25.316.000
5.2.19.59	Monitoring evaluasi dan pelaporan	39.751.925	38.351.925	96,48	100,00	1.400.000
5.2.19.60	Peningkatan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa PK-PLK	1.276.839.300	1.031.783.389	80,81	95,00	245.055.911
5.2.19.61	Penyusunanan Bahan pembelajaran siswa SLB	99.113.175	0	0,00	0,00	99.113.175
5.2.19.62	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	120.000.000	83.416.800	69,51	100,00	36.583.200
5.2.19.75	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus- Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	25.246.000	25.000.000	99,03	100,00	246.000
		10.552.084.400	8.268.477.914	78,36	86,44	2.283.606.486

Tabel 3.10.6. Realisasi Fisik Bidang Pengelolaan PKPLK Tahun Anggaran 2020

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Pembinaan Pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (25.01)	Tersedianya Dok DED Gedung Sekolah Baru (DPA-P)	2 Dok	2 Dok

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (25.03)	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	40 Ruang	40 Ruang
		Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (25.17)	Terlaksananya Alat Praktik dan Peraga Siswa SLB	3 Paket	3 Paket
		Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah (25.19)	Tersedianya meubelair sekolah	2 Paket	2 Paket
		Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah (25.41)	Tersedianya bangunan sekolah yang direhab	14 Paket	13 Paket
		Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (25.44)	Tersedianya ruang kelas sekolah yang direhab	3 Paket / ruang	3 Paket / ruang
		Kegiatan Workshop penyusunan / pengembangan Kurikulum (25.57)	Terlaksananya workshop pengembangan kurikulum	50 Orang	0
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (25.59)	Terlaksananya monitoring SLB	42 Sekolah	45 Sekolah
		Kegiatan Peningkatan minat, bakat, kreativitas siswa PK-PLK (25.60)	Terlaksananya kegiatan peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	Kegiatan / Orang	3 / 731
		Kegiatan Penyusunan Bahan Pembelajaran Siswa SLB (25.61)	Tersusunnya bahan pembelajaran	3 Dok	3 Dok
		Kegiatan Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik SLB (25.62)	Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	60 Orang	60 Orang
		Kegiatan Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (25.75)	Tersedianya Dok pendataan sekolah yang akurat dan akuntabel	4 Dok / 43 Sekolah	4 Dok / 43 Sekolah

3.10.5. Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan

Tahun 2020 Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.1.887.335.700,- realisasi keuangan Rp.1833.597.672; (97,15 %) dan daya serap Fisik 99,59 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 2,85 % sebesar Rp. 53.738.028; melalui 10 Program kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VIII RPJMD Indikator Nomor : 15 dan 16 Seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.6. Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan Tahun Anggaran 2020

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%		
5.2.20.09	Pengembangan system pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	84.333.800	46.769.000	55,46	74,00	37.564.800
5.2.20.10	Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	27.857.900	8.636.000	31,00	36,00	19.221.900
5.2.20.12	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestas iJenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk. Provinsi	703.273.050	550.024.550	78,21	100,00	153.248.500
5.2.20.13	Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	497.732.950	475.602.950	95,55	100,00	22.130.000
5.2.20.15	Seleksi Calon KepalaSekolah dan Pengawas Sekolah	561.101.100	306.121.100	54,56	100,00	254.980.000
5.2.20.16	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	45.372.350	23.672.350	52,17	60,00	21.700.000
5.2.20.19	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	1.891.730.000	1.807.424.359	95,54	98,00	84.305.641
5.2.20.21	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	227.425.000	184.625.000	81,18	91,00	42.800.000
5.2.20.22	Peningkatan Sistem Kendali Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	209.010.000	139.785.000	66,88	99,00	69.225.000
5.2.20.23	Olimpiade Sains Guru	167.926.900	115.348.100	68,69	92,00	52.578.800
		4.415.763.050	3.658.008.409	82,84	87,59	757.754.641

Tabel 3.10.7. Realisasi Fisik Bidang Pembinaan Ketenagaan Tahun Anggaran 2020

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Pelayanan	Kegiatan Pengembangan Sistem	Tersedianya data penataan, penempatan	3 Dok	2 Dok

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Pembinaan Ketenagaan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	<i>pendidik dan tenaga kependidikan</i>		
		Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	<i>Terlaksananya penghargaan dan perlindungan terhadap guru</i>	100 Orang	308 Orang
		Kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi jenjang SMA, SMK, dan PKPLK Tk. Provinsi	<i>Terlaksananya seleksi Guru dan tenaga kependidikan berprestasi jenjang SMA, SMK dan PKPLK</i>	150 Orang	150 Orang
		<i>Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan</i>	<i>Terlaksananya kegiatan Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan</i>	126 Orang	110 Orang
		<i>Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah</i>	<i>Terseleksinya Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah</i>	75 Orang	376 Orang
		<i>Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional</i>	<i>Terlaksananya Proses Penilaian Angka Kredit Jabatan</i>	90 Dok	18 Dok
		<i>Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan</i>	<i>Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan</i>	667 Orang	567 Orang
		<i>Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap</i>	<i>Terlaksananya kegiatan Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap</i>	1 Aplikasi	1 Aplikasi
		<i>Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Tersedianya Aplikasi Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	2 Aplikasi	2 Aplikasi
		<i>Olimpiade Sains Guru</i>	<i>Terlaksananya kegiatan Olimpiade Sains Guru</i>	100 Orang	77 Orang

3.10.6. Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kebudayaan

Tahun 2020 Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengalokasikan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebesar Rp.1.562.689.915,-realisasi keuangan Rp.1.484.157.865; (94,97 %) dan daya serap Fisik 96,45 % ini berarti ada efisiensi penggunaan dana sebesar 5,03 % sebesar Rp. 78.532.050; melalui 4

Program kegiatan yaitu untuk mendukung Sasaran Strategis No. 1, indikator kinerja No. 1 dan BAB VIII RPJMD Indikator Nomor : 60 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.7. Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020

NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi			SISA ANGGARAN
		KEUANGAN		FISIK %	
		(Rp)	%		
Program Pengembangan Nilai Budaya	2.090.224.300	1.698.078.385	81,24	82,87	392.145.915
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.600.425.000	2.307.804.515	88,75	92,83	292.620.485
Program Pengembangan kerjasama pengelola kekayaan Budaya	200.000.000	196.198.135	98,10	100,00	3.801.865
	4.890.649.300	4.202.081.035	85,92	88,87	688.568.265

Tabel 3.10.8. Realisasi Fisik Bidang Pembinaan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020

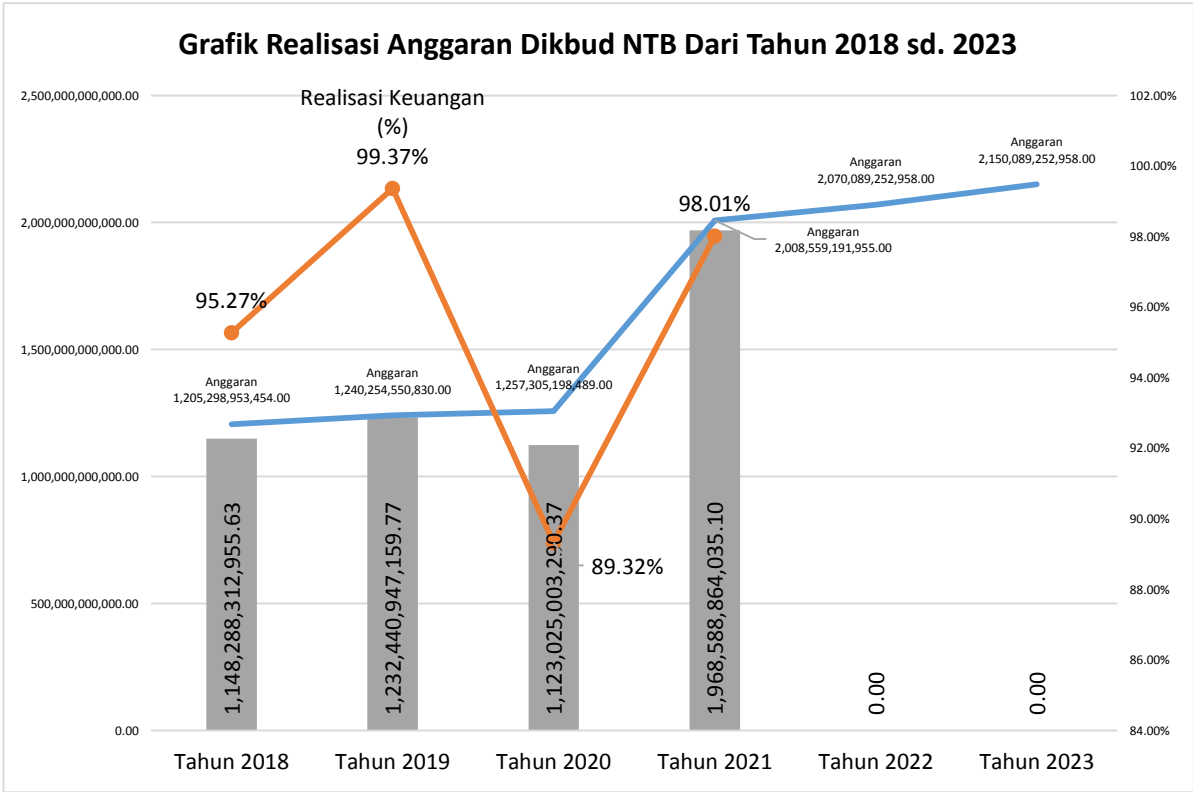
Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya (15.01)	Tersosialisasikannya Awiq-awiq yang didokumentasikan dalam bentuk Perdesatau dokumenlainnya	740 Orang	510 Orang
Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya (16)	Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah BukuCagar Budaya yang dicetak	1 Paket / 300 Eks	1 Paket / 300 Eks
		Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (16.06)	Jumlah Karya budaya yang dikembangkan	9 Jenis	9 Jenis
		Kegiatan Rehabilitasi / Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (16.22)	Jumlah Cagar Budaya yang dipagar	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya
Program Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya (17)	Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (17.05)	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni	11 Festival	9 Festival
		Kegiatan Peningkatan Teknis Sanggar Seni (17.11)	Terwujudnya peningkatan kualias SDM pada sanggar seni	6 Worksho p / 300 Orang	6 Worksho p / 300 Orang
		Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian (17.12)	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kesenian	15 Paket	15 Paket

Program	Sasaran Program	Kegiatan	CapaianIndikator Kinerja		
			Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah (18)	Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata	Tersedianya dokumen statistic kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen

3.11. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tabel 3.10.8. Jumlah dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
 Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2023

No.	Tahun Anggaran	Anggaran	Persentase Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	2018	1,205,298,953,454.00	95.27%	1,148,288,312,955.63		
2	2019	1,240,254,550,830.00	99.37%	1,232,440,947,159.77		
3	2020	1,257,305,198,489.00	89.32%	1,123,025,003,290.37		
4	2021	2,008,559,191,955.00	98.01%	1,968,588,864,035.10	98.44	
5	2022	2,070,089,252,958.00		0.00		Perkiraan
6	2023	2,150,089,252,958.00		0.00		Perkiraan
	Total	9,931,596,400,644.00		5,472,343,127,440.87		



Gambar 3.10.7.1. Grafik Realisasi Anggaran Dikbud NTB Dari Tahun 2018 Sampai Dengan 2023

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2020, Jumlah SMA 324 buah (Negeri 158 buah dan SMA Swasta 166 buah), dengan jumlah siswa 101.066 orang, guru 8.555 orang (5.164 guru tetap + 3.391 guru tidak tetap) dan ruang kelas 3.540 ruang. Jumlah SMK 311 buah (Negeri 93 buah dan SMK Swasta 218 buah), dengan jumlah siswa 72.684 orang, guru 6.588 orang (4.202 guru tetap + 2.386 guru tidak tetap), ruang kelas 2.573 ruang. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM 98,55 % (263.705) yang terdiri dari SMA 37,77 % (101.066), SMK 27,16 % (72.684), SMALB 0,18 % (479), MA 25,14 % (67.282) dan Paket C 8,29 % (22.194) dari Jumlah Penduduk Usia Sekolah 16-18 th sebanyak 267.595 Orang. Angka Partisipasi Muni APM 88,42% (236.597). Angka Putus sekolah SMA 0,37 % (393), putus sekolah SMK 0,65 % (465), dan siswa mengulang untuk SMA 0,61 % (639) dan SMK 1,07 % (763). Angka Melanjutkan ke SMA, SMK, MA Tahun 2018/2019 sebesar 99,32% (83.505) dari lulusan SMP/MTs sebesar 84.077 orang.

Selanjutnya Jumlah SLB Tahun 2020 di NTB sebanyak 44 buah (Negeri 16 buah, Swasta 28 buah), dengan jumlah siswa tingkat TKLB 99 orang (Laki-laki 52 orang, Perempuan 47 orang. Tingkat SDLB dengan jumlah siswa sebanyak 2.174 orang(laki-laki 1.255 orang dan perempuan 919 orang), Tingkat SMPLB dengan jumlah siswa 774 orang (laki-laki 424 orang dan perempuan 350 orang) dan Tingkat SMALB dengan jumlah Siswa 490 orang (Laki-laki 301 orang dan Perempuan 189 orang) serta guru 538 orang (173 Negeri dan 365 Swasta).

Selain indikator tersebut di atas, Tahun 2020 Nilai rata-rata UN SMA/MA rata-rata 44,49. Sedangkan nilai rata-rata UN SMK 40,38. Cagar Budaya terdiri dari berupa Situs sejumlah 163 buah, berupa benda sejarah 282 buah, berupa bangunan 192 buah, dan Struktur 361 buah. Rata-rata lama sekolah untuk usia penduduk 25 tahun keatas baru mencapai 7,03 tahun untuk tahun 2018, yang berarti kalau diambil rata-rata penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat setara kelas 1 SMP se derajat dan Harapan Lama sekolah 13,47 tahun. Akreditasi SMA yang ada pada Akreditasi A dan B sejumlah 77 % dari jumlah 314 Sekolah dan Akreditasi SMK yang ada pada Akreditasi A dan B sejumlah 62% dari jumlah 311 Sekolah. Jumlah anggaran yang bersumber dari DPA – SKPD (APBD I) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.257.305.198.489,- realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.236.211.393.249,- (98,32 %), dan realisasi fisik 99,78 %.

Selanjutnya, dapat dinyatakan secara singkat bahwa pada tahun 2021; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di dukung oleh anggaran APBD dan Sumber lainnya sebesar Rp. 2,008,559,191,955,- dapat terealisasi mencapai 1,968,588,864,035.10 atau sebesar 98.01%. Capaian kinerja meliputi Indeks Pendidikan yang telah mencapai 62.39%. Sumbangan terhadap indikator tersebut ke bawah berdasarkan urutan RPJMD Revisi 2021 yaitu;

1. Capaian Angka Partisipasi Murni 96.65%,
2. Capaian Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dari 1 : 32 pada tahun 2020 meningkat menjadi 1 : 0.92 pada tahun 2021
3. Rata-Rata Lama Sekolah tercapai 13.68 per tahun pada tahun 2020 selanjutnya meningkat pada tahun 2021 menjadi 13.90 pertahun.
4. Pembangunan bidang Kebudayaan dengan indikator penurunan Indeks Kriminal pada tahun 2021 mencapai 14,85%
5. Pencapaian indikator utama lainnya yaitu Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) dari target tahun 2019 yaitu 6.96 tahun tercapai 7.27 tahun meningkat sekitar 0.09 point tetapi tahun berikutnya meningkat 0.08 point dari target tahun 2020 yaitu 13.62 tahun tercapai 13.7 tahun, selanjutnya pada tahun 2021 di target 13.68 tahun tercapai 13.9 tahun atau meningkat sebesar 0.22 tahun.
6. Pencapaian indikator utama lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dari target tahun 2019 yaitu 13.57 tahun tercapai 13.48 tahun turun sekitar 0.31 tahun, tahun berikutnya meningkat 0.33 tahun dari target tahun 2020 yaitu 6.98 tahun tercapai 7.31 tahun, selanjutnya pada tahun 2021 di target 7.01 tahun tercapai 7.38 tahun atau meningkat sebesar 0.37 tahun.

Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTB dengan tujuan Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan indikator Persentase penurunan konflik sosial mencapai 16,67% yang didukung oleh pencapaian indikator Kinerja Dikbud NTB yaitu Cagar Budaya yang telah Direvitalisasi pada tahun 2019 mencapai 26%, kemudian pada tahun 2020 di target sebesar 24.35% tercapai 26%, selanjutnya ditargetkan 60.17% pada tahun 2021 namun hasil pencapaian kinerja belum terhitung karena terdapat kerancuan setelah evaluasi kinerja pada semester III tahun 2021 yang tentunya masih memerlukan penyesuaian.

Program Pengelolaan Pendidikan tahun 2021 rata – rata terjadi peningkatan pencapaian kinerja sebagaimana di bawah ini

1. APK SMA/MA/SMK/ Paket C dari target 99.15% tercapai 106.63%,
2. APM SMA/MA/SMK/ Paket C ditargetkan 93.40% meningkat menjadi 96.65%,

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB ditargetkan 69.40% meningkat mencapai 85.57%,
4. Rasio ketersediaan ruang kelas yang diproyeksikan untuk penduduk usia sekolah pendidikan menengah ditarget dengan Rasio 1:32 dapat dipertahankan dalam posisi angka yang sama
5. Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah terjadi penurunan pada tahun 2021 yaitu dari target Rasio 1:18 menjadi 1:11 yang menunjukkan jumlah guru yang masih ideal, sedangkan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB ditarget dari Rasio 1:8 turun menjadi Rasio 1:5 yang berarti juga ideal,
6. Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas terdapat berbagai kendala namun secara singkat dapat dinyatakan bahwa penyebab utama adalah keterbatasan anggaran sehingga perlu langkah – langkah efisiensi bahkan penentuan prioritas yang tentunya mengakibatkan pencapaian indikator kinerja terganggu. Namun berbalik dengan hal tersebut, Dikbud NTB setiap tahunnya didukung oleh Dana Alokasi Khusus fisik terutama untuk revitalisasi sekolah menengah, Dana Alokasi Khusus non fisik untuk bantuan biaya operasional sekolah, pengelolaan Museum, dan Taman Budaya.